

**INOVASI PROGRAM DESA SIAGA KEBAKARAN LINGKUNGAN  
(D'Sibali) DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diusulkan oleh

NUR AYYUNG

Nomor Stambuk : 105610492114



**PROGRAM ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**INOVASI PROGRAM DESA SIAGA KEBAKARAN LINGKUNGAN  
(D'Sibali) DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan Diajukan Oleh

**NUR AYYUNG**

Nomor Stambuk : 105610492114

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran  
Lingkungan (D'Sibali) di Kabupaten Gowa**

Nama Mahasiswa : Nur Ayyung

Nomor Stambuk : 105610492114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Hj Rulinawaty Kasmad, M.Si

Pembimbing II



Nasrul Haq, S.Sos., MPA

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., MPA

NBM : 1067 463

## PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0048/FSP/A.4-11/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2019.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

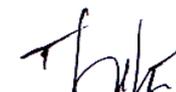
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

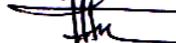
1. Abdul Kadir adys,SH.,MH (Ketua)

(  )

2. Dr. Hj Fatmawati M.Si

(  )

3. Dr. Jaelan Usman, M.Si

(  )

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : NUR AYYUNG

Nomor Stambuk : 105610492114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul: “Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D’Sibali) di Kabupaten Gowa” adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang ditujukan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 29 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



NUR AYYUNG

## ABSTRAK

**Nur ayyung, 2019. *Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) di Kabupaten Gowa***(dibimbing oleh Rulinawaty Kasmad dan Nasrul Haq)

Inovasi adalah pembaharuan sebuah konsep dalam literatur ilmu administrasi publik untuk dapat melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik dari suatu program kebijakan yang ada. Dari hasil inovasi nantinya akan terlihat apakah Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) ini benar-benar member manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Berdasarkan hal tersebut peneliti mendorong untuk melakukan Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) dengan menggunakan teori Robbins & Coulter. Dimana dalam teori Robbins & Coulter ada tiga indikator yang digunakan dalam inovasi suatu program yaitu indikator struktur inovasi, budaya inovasi, sumber daya inovasi. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum keadaan yang sebenarnya secara jelas yang ada di lapangan. Kemudian data yang di kumpul dari hasil penelitian di lapangan secara obyektif dengan tipe deskriptif. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) di Kabupaten Gowa sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan standar operasional pelayanan. Dilihat dari indikator Struktur Inovasi, yang meliputi sumber daya manusia, komunikasi dan organisasi. Dimana SDM dalam program ini benar-benar saling bekerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkenah musibah kebakaran kemudian komunikasi yang saling terjalin dengan baik dan dari segi organisasi yang terbentuk adalah barisan relawan pemadam kebakaran (Balakar). Indikator Budaya Inovasi, yang meliputi menoleransi resiko dan menoleransi konflik, dimana perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan mengenai masalah penanganan dini mengenai masalah kebakaran, kemudian masih kurangnya pengadaan alat pemadam kebakaran sehingga ketika terjadi masalah kebakaran terkadang mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Indikator Sumber Daya Inovasi yang meliputi pelatihan-pelatihan dan memberikan keamanan kerja. Dimana melakukan pelatihan-pelatihan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran mengenai cara pemadaman api. Dari segi pemberian keamanan kerja Dinas Pemadam Kebakaran di berikan tunjangan asuransi berupa BPJS ketenaga kerjaan.

*Kata Kunci: Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran (D'Sibali)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”*

*Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahna, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D’Sibali) di Kabupaten Gowa”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Muh.Yahya dan St.Aisyah atas dukungan, semangat serta doa-doa yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang tidak ternilai, baik moral maupun materi, nasehat yang tak terhingga demi menyekolahkan penulis agar bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Buat sodaraku Muh.Yusram dan Zulkifli S.pd terimakasih atas semua bantuan dan bentuk penyemangat yang tak ternilai

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M** selaku rector Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibunda **Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda **Dr. H. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini memberikan ilmu, dorongan dan semangat kepada penulis.
6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Gowa dan Kantor Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kab. Gowa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada Bapak Syamsul Bahri, SH selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran penulis sangat berterimakasih banyak atas segala bantuan bapak dalam memberikan informasi dan data-data penting dalam menyelesaikan tugas penulis.
8. Kepada saudariku Kiki Rezki Amalia S.Sos, Hardianti S.Sos, Nur Eka Puspita Muchtar S.Sos, St Nurul Maghfira Rusma S.Sos yang selama ini selalu menemani penulis dalam melakukan penelitian sampai selesai saya sangat berterimakasih karna telah dipertemukan oleh mereka semua yang sangat senantiasa mendampingi penulis tanpa mengenal kata lelah di bawah teriknya matahari mendampingi penulis.
9. Buat sodaraku **AnitaArahayu S.Sos, Nurjannaty Usman S.Sos** yang senantiasa memberikan dorongan dan motifasi kepada penulis sampai-sampai meluangkan waktunya untuk nginap di rumah demi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman kelas **ADN 014 C** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah, selalu punya cerita dikelas dan pengalaman tersendiri selama dalam ruangan.
11. Kepada seluruh keluarga besar **SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar** terutama kepada satu angkatan penulis **AFILIASI 2014** yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 29 Agustus 2019

Penulis,



NUR AYYUNG

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Penerimaan Tim .....	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Karya.....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Konsep Inovasi.....	10
B. Program.....	30
C. Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) Kabupaten Gowa .....	35
D. Kerangka Pikir .....	37
E. Fokus Penelitian.....	38
F. Deskriptif Fokus Penelitian.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	43
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45

F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Pengabsahan Data .....	47
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa .....	48
2. Profil Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa .....	49
3. Profil Kantor Desa Sunggumanai Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa.....	59
B. Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D’Sibali) di Kabupaten Gowa.....	61
1. Struktur Inovasi.....	61
2. Budaya Inovasi.....	70
3. Sumber Daya Inovasi.....	77
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

A. Tabel1 Jenis Inovasi di Sektor Publik.....	26
B. Tabel 2 Informan Penelitian.....	44
C. Tabel 3StrukturInovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan Kab. Gowa .....	62
D. Tabel4 Budaya Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan Kab. Gowa.....	70
E. Tabel5 Sumber Daya Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan Kab. Gowa .....	77



## DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1 Bentuk Inovasi.....	15
B. Gambar 2 Tingkatan Tingkatan Inovasi.....	22
C. Gambar 3 Kerangka Pikir.....	37
D. Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran .....	51
E. Gambar 5 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sunggumanai.....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 pasal 7 ayat (4) huruf c, tentang pelayanan publik, maka ditetapkan pada tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik sebagai upaya memfokuskan kebijakan dan implementasi kebijakan terarah, mendalam dan berkesinambungan dalam membangun inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada konteks yang lebih spesifik, yakni pada tataran pemerintah daerah, secara normatif perturan Pemerintah Daerah diatur pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XXI Pasal 386, disebutkan bahwa inovasi pemerintah daerah adalah *“semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.”* Pembaharuan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintah daerah, termasuk dalam peran pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Instansi pemerintah adalah organisasi yang memiliki peran sebagai abdi masyarakat yang memiliki kewajiban melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam pembangunan daerah mulai dari kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan sebagai rangkaian dari kebijakan publik.

Inovasi adalah pembaharuan sebuah konsep dalam literatur ilmu administrasi publik. Meskipun demikian, dalam perkembangan belakangan ini, sejak lahirnya *New Public Management*, perhatian terhadap konsep inovasi dan praktiknya dalam administrasi publik mulai diperhatikan dan menjadi sesuatu yang penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mulyadi, dkk. 2016: 75).

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu penentu penilaian baik atau buruknya kinerja pemerintah. Kepuasan masyarakat dalam pelayanan adalah bukti keseriusan pemerintah dalam merealisasikan *local good governance*. Inisiatif untuk melakukan perbaikan disisi pemerintahan sebetulnya tidak kurang banyaknya dari upaya penguatan *civil society* (Hetifa 2009).

Menurut Lewis dan Gilman (2005), bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.

Ratminto dan Winarsih (2010: 2), bahwa pelayanan publik adalah berbagai bentuk jasa pelayanan, pelayanan administrasi pemerintahan/pelayanan perijinan, baik itu barang publik maupun dalam bentuk jasa yang pada hakikatnya merupakan

tanggung jawab di lakukan oleh instansi pemerintah (pusat dan daerah) sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Dwiyanto dalam Nasrulhaq (2017) ada beberapa kriteria yang dapat dikategorikan pelayanan publik. Kriteria pertama yaitu barang dan jasa yang memiliki eksternalitas tinggi. Kriteria kedua yaitu tujuan dari penyediaan barang dan jasa. Pelayanan publik tidak terlepas dari namanya pemerintah, pemerintah memiliki fungsi yang sangat berpengaruh pada tingkat pelayanan publik.

Klaim masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik semakin hari semakin meningkat. Sejalan dengan itu Dinas Pemadam Kebakaran sebagai institusi pemberi pelayanan terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah dituntut untuk memberikan pelayanan berkualitas, unggul dan kepuasan yang langsung dirasakan masyarakat dalam pelayanan publik. Inovasi dalam memberikan pelayanan merupakan bentuk pembaharuan ide atau gagasan yang patut dilaksanakan oleh pelayan publik. Sebagai institusi pemberian layanan kepada masyarakat yang terkena musibah, Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya dituntut untuk mempertahankan layanan yang sudah ada, namun juga didorong untuk meningkatkan mutu standar layanan. Inovasi tidak mutlak bergantung pada teknologi, namun lebih kepada ide yang *out of the box*, terobosan, kreatifitas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, menurut Damanpour dalam Suwarno (2008:9) mengatakan bahwa pelayanan inovasi mampu berbentuk produk barang atau jasa yang baru, teknologi yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru

bagi organisasi. Pelayanan publik menjadi terobosan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya seperti di Kabupaten Gowa.

Di Kabupaten Gowa telah terjadi banjir dan longsor menurut Kepala Pusat Data dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 27 Januari 2019 mengatakan korban meninggal terbanyak ada di Kabupaten Gowa “Di Gowa 45 meninggal, Makassar 1 orang, Jeneponto 14 orang, Maros 4 orang, Takalar 2 orang, Selayar 2 orang, dan 7 orang dinyatakan hilang dalam proses pencarian” (TribunJabar.id, 2019). Bencana alam dapat terjadi tanpa ada prediksi sebelumnya di Kabupaten Gowa sehingga dibutuhkan peranan tim penanggulangan bencana atau Damkar dalam penanggulangan bencana alam dan kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran mengacu pada peraturan Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Sistem Proteksi Kebakaran di Perkotaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut, untuk memudahkan keterjangkauan dan pelayanan yang cepat, dalam satu wilayah yurisdiksi Pemerintahan, wilayah tersebut dibagi menjadi sub wilayah yang disebut dengan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Kriteria pembagian WMK disusun berdasarkan antara lain, jarak tempuh dari titik Pos maksimal 7,5 KM waktu tanggap maksimal 15 menit, memperhitungkan ketersediaan dan waktu pengambilan air (*Delivery Rate*) di masing-masing WMK. Sedangkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal 1 unit armada pemadam kebakaran diharapkan dapat melindungi

25.000 jiwa penduduk dan 1 orang petugas pemadam kebakaran melayani minimal 5.000 jiwa penduduk.

Area proyek perlindungan “*Optimalisasi Upaya Proteksi Kebakaran D’SIBALI (Desa Siaga Kebakaran Lingkungan)*” melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pendampingan dan Pengawasan yang diharapkan dapat memproteksi Wilayahnya sendiri dan menangani pemadaman kebakaran dengan skala tertentu secara mandiri”(Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XII Dinas Pemadam Kebakaran, 2017).

Desa siaga adalah desa dengan penduduk yang memiliki ketersediaan sumber daya, kapasitas dan kemauan guna mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan, bahaya dan permasalahan serius secara mandiri. Pada hakikatnya, desa siaga memberdayakan masyarakat agar mampu melaksanakan kehidupan yang sehat.

Pembangunan desa atau kelurahan siaga aktif menggambarkan program lanjutan dan akselerasi dari program desa siaga dilakukan pada tahun 2006. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1529/MENKES/SK/X/2010 bahwa pengembangan inovasi program desa siaga kebakaran lingkungan atau kelurahan siaga aktif dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu akomodasi proses belajar masyarakat desa atau kelurahan dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Pengembangan desa atau kelurahan siaga aktif merupakan program pemberdayaan masyarakat, sehingga penerapan kegiatannya terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat yang lain, baik bersifat nasional, sektoral maupun

daerah. Berdasarkan hasil survey sebesar 42.295 (56,1%) desa atau kelurahan sudah melahirkan desa siaga atau kelurahan siaga aktif.

Belum semua desa atau kelurahan siaga yang tercatat mencapai kondisi siaga aktif yang sesungguhnya. Masih ada beberapa desa atau kelurahan yang penduduknya tidak memiliki kesiapan sumber daya, kapasitas dalam mencegah, menanggulangi permasalahan kesehatan dan bencana alam secara mandiri. Untuk itu, pengembangan desa siaga aktif adalah peran pemerintah daerah di setiap wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, terus dibutuhkan inovasi program desa siaga aktif yang dilakukan oleh setiap desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dengan melihat kondisi kabupaten gowa saat ini baik dari perspektif wilayah maupun penduduk masih sangat sulit untuk mencapai standar pelayanan minimum. Hal ini disebabkan rasio jumlah pemadam kebakaran dan jumlah penduduk yang harus dilindungi masih terpaut jauh dari SPM. Sedangkan jumlah armada dinas pemadam kebakaran Kabupaten Gowa sampai saat ini hanya sebanyak 4 unit dengan jumlah penduduk 750.000 jiwa demikian juga jarak tempuh yang masuk dalam area terlindungi masih sangat sempit karena saat ini dinas pemadam kebakaran hanya mempunyai 1 pos sedangkan luas wilayah yang harus dilindungi seluas 1883,33 KM.

Hadirnya Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'SIBALI) dan barisan relawan pemadam kebakaran sangat membantu tugas pokok dinas pemadam kebakaran, dengan hadirnya program ini terbentuk atas usulan Kepala Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa kepada Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Gowa. Sehingga Desa Sunggumanai merupakan Desa pertama memiliki balakar yang ditetapkan sebagai D'Sibali dikarenakan desa sunggumanai ini merupakan desa diluar area terlindungi wilayah kebakaran. Dalam sosialisasi balakar yang dilaksanakan 24 juli 2017 Abdul Rasyid kepala desa Sunggumanai menyatakan terbentuknya balakar atau relawan masyarakat yang ada di desa ini adalah upaya pencegahan dan penanganan kebakaran yang melibatkan seutuhnya masyarakat Desa Sunggumanai untuk ikut serta dalam menangani bencana kebakaran ataupun musibah lainnya yang ada di desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian diatas maka, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami dalam pembentukan Desa Siaga Kebakaran Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa. Maka peneliti berupaya mengetahui kelemahan-kelemahan program Desa Siaga Lingkungan menggunakan teori Inovasi oleh Robbins dan Coulter dengan judul **“Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) di Kabupaten Gowa.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana struktur inovasi program desa siaga lingkungan D'Sibali di Kabupaten Gowa ?

2. Bagaimana budaya inovasi program desa siaga lingkungan D'Sibali di Kabupaten Gowa ?
3. Bagaimana sumber daya inovasi program desa siaga lingkungan D'Sibali di kabupaten Gowa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui struktur inovasi program desa siaga lingkungan D'Sibali di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui budaya inovasi program desa siaga lingkungan D'Sibali di Kabupaten Gowa
3. Untuk mengetahui sumber daya inovasi program desa siaga lingkungan D'Sibali di kabupaten Gowa

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka, adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dan dicapai pada penelitian ada dua yaitu; manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pembaca dan penulis dalam penulisan berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini Sebagai bahan pengevaluasian kinerja yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dalam mengatasi permasalahan kebakaran di Kabupaten Gowa dan diharapkan memberikan kontribusi dan referensi terhadap masyarakat yang diharapkan mampu memahami dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program D'SIBALI di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Inovasi**

##### **1. Pengertian Inovasi**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada pasal (1) menyatakan bahwa inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan daerah. kemudian dijelaskan pada pasal (2) yang menyatakan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. kriteria inovasi daerah meliputi: mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi (PP Nomor 38 Tahun 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sebuah landasan utama bagi setiap daerah untuk melakukan inovasi sebagai terobosan baru khususnya bag iinstansi atau lembaga publik dalam upaya meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik adalah dengan diterapkannya *one agency one innovation* atau satu instansi, satu inovasi yang merupakan akselerasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai langkah yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kreativitas instansi atau lembaga publik di seluruh daerah di Indonesia diadakan kompetisi inovasi pelayanan publik yang nantinya akan diberikan penilaian oleh Kemen PAN RB (<http://inovasi.lan.go.id>).

Secara umum inovasi sering kali diterjemahkan sebagai penemuan baru, namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi sektor swasta. Sedangkan, inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien dan berkualitas, murah dan terjangkau (Angraeny, 2013).

Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris *innovation* berarti perubahan. Inovasi berarti suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta menghasilkan manfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Makmur dan Rohana (Zulfanuridin, 2016), Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru.

Selanjutnya inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Pengertian inovasi yang dirangkum oleh Deddy, Hendrikus dan Muhammad (2016) dari berbagai sumber sebagai berikut:

- a. Proses pemikiran dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dan bermanfaat (*expediency*).
- b. Jawaban atas segala permasalahan dalam organisasi.
- c. Penemuan baru yang berbeda dari sebelumnya atau sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, dan alat).
- d. Suatu ide, praktek, dan benda yang diduga sesuatu yang baru dari individu atau unit adopsi lain.

Sumber referensi yang lain di tulis oleh Putera (2014), dirangkum beberapa definisi berikut:

- a. Mytleka (World Bank, 2006) mendefinisikan konsep inovasi sebagai “gagasan dari proses pembuatan perubahan lokal, sesuatu yang baru bagi pengguna yang merupakan dasar dari inovasi khususnya proses dimana organisasi menguasai dan melaksanakan desain dan produksi barang dan jasa yang baru baik bagi mereka, kompetitor, negara maupun dunia”.
- b. Edquist (Taufik, 2005) mengartikan inovasi adalah sebuah ciptaan baru (bentuk materi ataupun intangible) yang memiliki mutu ekonomi yang

berarti (signifikan), umumnya dilaksanakan bagi perusahaan atau para individu.

Terminologi umum, inovasi merupakan satu ide atau gagasan kreatif yang dilaksanakan dalam menyelesaikan tuntutan suatu masalah (Sangkala, 2013: 26). Sedangkan menurut Osborne & Brown (Rahayu, 2015: 81) menyatakan bahwa inovasi merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa yang lalu. Ketidakberlanjutan ini merupakan perilaku yang membedakan inovasi dengan perubahan. Lebih lanjut dikatakan inovasi menjadi identifikasi kepada elemen baru pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen atau keahlian proses baru.

Selain itu, menurut Pugh dalam Rahayu (2015: 84), menyatakan inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi digambarkan dengan produk-produk dan proses produksi baru, kemajuan teknologi komunikasi, organisasi dan layanan baru sektor publik serta sektor non-profit. Senada dengan pendapat tersebut menurut Daft dalam Rahayu (2015: 84) menyatakan bahwa inovasi organisasi berkaitan dengan adopsi sebuah ide atau perilaku yang sifatnya baru bagi organisasi yang mengadopsinya. Secara lebih khusus, inovasi didefinisikan sebagai sebuah awal penggunaan ide oleh sebuah organisasi dengan tujuan yang sama. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa inovasi memiliki nilai tambah karena keterbaruan yang dibawa kedalam organisasi.

Inovasi menurut Ducker merupakan hasil kerja *Knowing* dibandingkan *doing*, inovasi dapat dilakukan secara efektif dengan memperhatikan aspek utama dalam organisasi (Rahayu, 2015: 103). Selain itu, menurut Osborne & Brown (Rahayu, 2015: 82) Proses ini tidak hanya mengidentifikasi kesempatan yang menarik tetapi juga membutuhkan seorang individu untuk mencapai respon yang disebut sebagai *functional inspiration*. Meskipun terdapat perbedaan sudut pandang dalam menilai inovasi tetap memberikan beberapa fitur yang menjadi dasar dalam inovasi. Pertama, inovasi menggambarkan keterburuan. Kedua, dari inovasi adalah hubungan terhadap penemuan konsensus. Ketiga, inovasi adalah proses dan *outcome*.

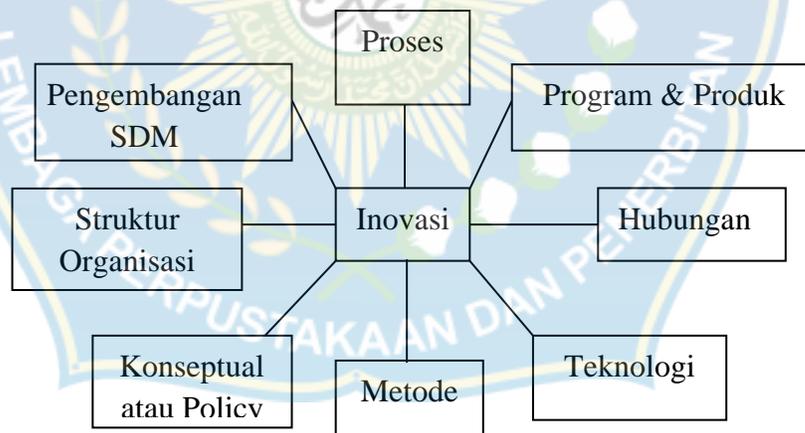
Senada dengan pendapat inovasi menurut Defny (2017:36) bahwa inovasi tidak dapat secara serampangan diterjemahkan sebagai hanya “kebaharuan” dan “keunikan” tetapi mesti berkaitan dengan tingkat kinerja dan dampak yang dipertemukan dengan kepentingan publik. Hal ini merupakan konsensus logis dari upaya memberikan nilai tambah terhadap upaya perubahan ke arah “pembaharuan” itu sendiri.

Selain itu, Menurut Djamaludin Ancok (Deddy, 2016:70) jenis inovasi dalam bukunya *psikologi kepemimpinan & inovasi*, ada 8 jenis inovasi yaitu:

- a. Inovasi proses
- b. Inovasi metode
- c. Inovasi struktur organisasi

- d. Inovasi dalam hubungan
- e. Inovasi strategi
- f. Inovasi pola pikir
- g. Inovasi produk
- h. Inovasi pelayanan

Sedangkan menurut Windrum (Deddy, 2016:70) bentuk-bentuk inovasi pada sektor publik, meliputi: inovasi pelayanan, inovasi penyediaan pelayanan, inovasi administratif atau organisasional, inovasi konseptual, inovasi kebijakan, dan inovasi sistemik. Adapun bentuk-bentuk inovasi oleh Utomo (Deddy, 2016: 70-71) pemahaman tentang bentuk inovasi administrasi publik yang dilakukan terdapat pada bagan adalah berikut ini:



Gambar 1 Bentuk inovasi  
 Sumber: LAN RI, 2014 (Deddy, 2016:71 )

Senada dengan pendapat diatas menurut Deddy (2016:71) Berbagai bentuk inovasi tersebut dapat dilakukan oleh birokrasi pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publiknya. Namun harus kita pahami bahwa dalam

konteks administrasi publik, inovasi yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan sistem atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjerat persoalan hukum. Oleh karena itu, inovasi dalam administrasi publik harus memiliki karakteristik, “kompatibel” dengan sistem yang berlaku. Artinya bahwa inovasi yang dilakukan harus memperhatikan sistem yang ada diluar dirinya. Dengan kata lain bahwa inovasi dalam administrasi publik, tidak melanggar atau berbenturan dengan aturan atau sistem yang telah ada.

Sementara menurut Dwiyanto (2004), pentingnya dilakukan inovasi dalam administrasi publik karena beberapa hal berikut :

- a. Dinamika perubahan di tingkat nasional, global, regional maupun lokal, yang berlangsung secara cepat, menuntut berbagai penyesuaian dalam pembangunan dan pengembangan daerah dan wilayah.
- b. Pembangunan dan pengembangan wilayah tidak lagi bisa dijalankan dengan cara-cara konvensional namun membutuhkan sistem dan sumber daya manusia

Selain itu, menurut Robbins & Coulter (2010: 16) terdapat tiga rangkaian variabel yang merangsang terjadinya inovasi yaitu;

- a. Struktur pada inovasi
  - 1) Ketersediaan sumber daya yang kaya memberikan pondasi utama bagi inovasi.

- 2) Komunikasi yang sering antar unit-unit membantu menghancurkan penghambat-penghambat inovasi.
  - 3) Organisasi yang inovatif berupaya meminimalisasi ketekanan waktu yang minimal atau ekstrim terhadap kegiatan kreatif.
  - 4) Kinerja kreatif seorang karyawan diperkaya ketika suatu struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreatifitas.
- b. Budaya pada inovasi
- 1) Menoleransi resiko
  - 2) Menoleransi konflik
- c. Sumber daya pada inovasi
- 1) Pelatihan-pelatihan yang inovatif secara aktif memajukan pelatihan dan pengembangan anggota mereka agar pengetahuan mereka berkembang.
  - 2) Memberikan keamanan kerja yang tinggi kepada karyawan untuk mengurangi kecemasan akan dipecat akibat melakukan kesalahan, dan mendorong individu menjadi pejuang ide.

Strategi inovasi dalam pemerintahan menurut Sangkala dalam Muchlas (2015:284) pada analisis dan praktek inovasi yang sukses menyatakan bahwa terdapat lima strategi utama dalam sektor pemerintah yaitu:

a. Layanan terintegrasi

Layanan terintegrasi adalah penewaran dari sektor publik dalam meningkatkan sejumlah layanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dengan meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.

b. Desentralisasi pemberi layanan dan monitoring layanan

Desentralisasi pemberi layanan dan monitoring layanan tentu membawa layanan semakin dekat dengan masyarakat dan lazimnya menumbuhkan kepastian terhadap taraf permintaan yang tinggi hingga menambah kepuasan masyarakat. Desentralisasi layanan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kepercayaan dalam pemeritahan.

c. Pemanfaatan kerjasama

Pemanfaatan kerjasama merupakan pemerintahan yang inovatif dalam memenuhi pengembangan pemuasan sehingga makin efisien dalam pemberian layanan publik, kerjasama lebih terjalin antar organisasi antar publik dan swasta.

d. Pelibatan warga negara

Pelibatan warga negara adalah kewenangan pemerintahan yang inovatif dengan merealisasikan peran penting memotivasi peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan. Pendekatan partisipasi memungkinkan warga mengungkapkan kebutuhan dan opininya terhadap proposal teknis dan memfasilitasi penerapan proyek yang diberikan dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dari sebuah inovasi perubahan.

e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi adanya kontribusi internet dalam menyederhanakan dan memperbaiki cara warga negara memperoleh informasi serta berkomunikasi dengan entitas publik. Internet dapat pula

bermanfaat sebagai alat perbaikan transparansi dan integritas dalam administrasi publik.

Menurut Rogers prosedur inovasi guna organisasi berbeda dari proses yang terjadi secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dapat mengadopsi inovasi melalui tahapan sebagai berikut (Abdillah, 2016):

a. *Initiation* perintisan

Terhadap perintisan (pembukaan) terjadi atas fase *agenda setting* dan *matching*. Tahapan tersebut sebagai awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan yang terjadi pada organisasi. Pada tahapan *agenda setting* yang dibuat mekanisme identifikasi dan penentuan prioritas kebutuhan dan masalah. Kemudian dilaksanakan pemeriksaan pada lingkungan organisasi untuk menentukan tempat inovasi tersebut akan di aplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan ini juga biasanya dikenali adanya *performance gap* atau kesenjangan kinerja. Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian inovasi dalam organisasi. Fase selanjutnya adalah *matching* atau penyuaian. Pada tahapan ini permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Pada tahap ini memilih *feasibilities* atau kelayakan inovasi dalam diterapkan pada organisasi tersebut.

b. *Implementation* atau pelaksanaan

Tahapan *Implementation*, perintisan telah mewujudkan keputusan dalam menelusuri dan menerima inovasi yang diduga dapat menyelesaikan

permasalahan organisasi. Tahapan implementasi ini terdiri atas fase redefinisi, interpretasi dan rutinisasi. Pada fase redefinisi, semua inovasi yang di adopsi mulai kehilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati proses re-invention, sehingga lebih dekat membantu kebutuhan dalam organisasi. Fase ini, baik inovasi ataupun organisasi me-refinisi dan menghadapi proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Pada umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.

Fase klarifikasi adalah berlangsung apabila inovasi telah dibuat menyebar pada organisasi dan mempengaruhi semua anggota organisasi dalam kehidupan sehari-hari selama bekerja. Fase klarifikasi memerlukan waktu lama dengan mempengaruhi budaya organisasi dengan menyeluruh, sehingga kurang yang mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang lebih cepat akan menjadi kontra produktif berefek pada resistensi yang melewati batas.

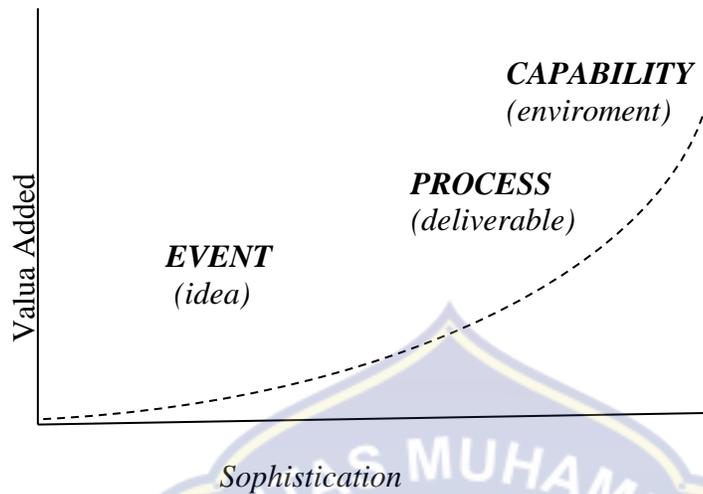
Fase rutinisasi adalah fase dimana inovasi sudah di anggap seperti bagian dari pada organisasi. Inovasi bukan lagi mencirikan semacam produk baru atau cara baru, sebab sudah menjadi elemen rutin penyelenggaraan organisasi. Organisasi bisnis yang biasanya sangat inovatif dan berfokus pada outcome serta Unilever dan Shell, didorong bersama budaya organisasi yang benar, *reward* dan metode inovasi yang hadir memberikan manfaat.

Definisi para tokoh tersebut, penulis menyimpulkan bahwa inovasi erat kaitannya dengan perubahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya bahwa inovasi menjadi satu kunci yang bisa digunakan oleh organisasi dalam menghadapi sebuah perubahan. Definisi inovasi yang cenderung positif karena inovasi menjadi strategi yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan manajemen perubahan yang efektif. Organisasi akan berbicara mengenai bagaimana poin-poin keterbaruan yang menjadi karakter inovasi dapat dikembangkan secara keseluruhan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan kontrol sehingga dapat menghubungkan semua aspek organisasi.

## 2. Tingkatan Inovasi

Menurut Shapiro dalam Rahayu (2015:95) secara tegas menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu *capability* (kapabilitas). Bagi organisasi yang inovatif, seluruh aspek dari suatu kapabilitas dapat dilihat dalam tingkatan pengembangan inovasi dalam dimensi penambahan nilai atau *vale added*, dan kondisi kecanggihan atau *sophistication*. Pada tingkatan pertama, inovasi sebagai *event*, pada tingkatan kedua sebagai *process*, dan tingkatan ketiga, inovasi sebagai *capability*. Berikut ini ilustrasinya:



Gambar 2 Tingkatan-tingkatan inovasi  
 Sumber: Shapiro, 2002 (Rahayu, 2015)

Tingkat pertama, kebanyakan orang melihat inovasi hanya sebagai 'event' atau kejadian semata, memang demikian pada awalnya. Inovasi dalam tingkatan sebagai *event*, pada awalnya memang baru berupa *brainstorming* dan kontes memamerkan ide-ide baru. Jika ide-ide baru tersebut diterima oleh organisasi maka disana ada nilai tambah bagi organisasi. Syarat pada tahapan ini adalah perlunya prakondisi yang mendukung dan kepemimpinan yang terbuka. Pada tingkatan yang lebih tinggi, inovasi tidak hanya sekedar ide-ide baru, namun juga menjadi bagian dari suatu proses produksi, dimana organisasi memasukkan inovasi kedalam perencanaan, dan struktur dari pemecahan masalah, mewujudkan, dan mengembangkannya serta mengevaluasi implementasi dari ide-ide baru tersebut. Prakondisi pertama selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah peluang baru lengkap dengan dukungan infrastruktur dan sumberdaya yang diperlukan. Tingkatan selanjutnya inovasi

akan sebagai capability manakala inovasi tidak hanya untuk memecahkan masalah semata, melainkan merepresentasikan organisasi itu sendiri dan apa yang mereka lakukan sepenuhnya sangat inovatif.

### 3. Kriteria Inovasi

Berdasar pada sejumlah pemahaman mengenai inovasi, dapat disimpulkan bahwa sebuah program yang inovatif biasanya akan menjadi *best practices*. Dalam sidang umum PBB, telah merekomendasikan bahwa *best practices* digunakan oleh UN sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang didasarkan atas apa yang terjadi di lapangan. *Best practice* memiliki tiga karakteristik yang dikutip dalam *Report of the Preparatory Committee for the United Nation Conference on Human Settlement* (Abdillah, 2016) yaitu:

- a. Memiliki dampak yang dapat ditunjukkan dan didemonstrasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil.
- c. Berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka instrument *best practices* inilah yang dipilih untuk digunakan dalam menilai inovasi program yang ada dan yang telah ditetapkan. Maka dalam menentukan kriteria *best practices* menurut UN (sangkala, 2014: 8) yaitu;

- a. Dampak (*Impact*) adalah suatu *best practice* perlu memperlihatkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (*Tangible*) untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
- b. Kemitraan (*Partnership*) adalah suatu *best practice* perlu berdasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor yang terlibat dan melibatkan dua pihak.
- c. Keberlanjutan (*Sustainability*) adalah suatu *best practice* yang perlu membawakan perubahan dasar pada wilayah yang memiliki masalah sebagai berikut:
- 1) Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi.
  - 2) Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya refleksi dimanapun.
  - 3) Kerangka institusional dan proses perumusan kebijakan harus memperoleh kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab birokrat atau aktor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM dan organisasi masyarakat.
  - 4) Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.
  - 5) Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership dan community empowerment*) adalah sebagai berikut:

- a) Kepemimpinan perlu menjadi inspirasi bagi adanya perilaku dan perubahan yang didalamnya perubahan dalam kebijakan publik.
- b) Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas yang lain serta koalisi tentang kontribusi akan dilaksanakan oleh masyarakat.
- c) Penerimaan dan tanggung jawab kepada perbedaan sosial serta budaya.
- d) Tampaknya akan adanya transfer (*Transferability*) pengembangan lebih lanjut dan replikasi.
- e) Cocok pada situasi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.

#### **4. Jenis Inovasi Dalam Sektor Publik**

Mulgan dan Albury (Dhewanto, 2014) mengetahui bahwa tiga jenis inovasi (Inkeremental, Radikal, dan Sistemik) dapat berasal pada tingkat yang berbeda (Lokal, lintas organisasi, nasional) sehingga departemen pemerintah memiliki tiga peran kebijakan yang saling terkait sehubungan dengan inovasi: kebijakan inovasi: arah kebijakan baru dan inisiasi, inovasi dalam proses pembuatan kebijakan, dan kebijakan untuk mendorong inovasi dan difusi. Adapun jenis inovasi dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Jenis Inovasi di Sektor Publik

Jenis inovasi	Contoh
Sebuah layanan baru atau peningkatan layanan	Perawatan kesehatan dirumah sakit
Administrasi inovasi	Penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai akibat dari perubahan kebijakan
Sistem inovasi	Bentuk sistem baru atau modifikasi dasar dari sistem yang ada yang membentuk organisasi-organisasi baru/pola-pola kerjasama dan interaksi baru
Konseptual inovasi	Perubahan dalam pandangan, perubahan tersebut disertai dengan penggunaan konsep-konsep baru, misalnya pengelolaan air terpadu
Rasionalitas perubahan radikal	Pergeseran pandangan dunia atau matriks mental karyawan dari suatu organisasi

Sumber: Halverson (Dhewanto dkk, 2014)

Kemudian tipologi inovasi disektor publik menurut Halvorsen (Dhewanto, 2014: 30) adalah sebagai berikut:

- a. *A new or improved service* (pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki), misalnya kesehatan di rumah.
- b. *Process innovation* (inovasi proses) adalah perubahan pada proses penyediaan layanan atau produk.
- c. *Administrative innovation* (inovasi administratif) merupakan penerapan instrumen kebijakan yang baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan sebelumnya.
- d. *System innovation* (inovasi sistem) adalah sistem yang baru atau perubahan dasar pada sistem dengan mendirikan organisasi baru yang ada sebelumnya atau bentuk kerjasama dan interaksi yang baru.

- e. *Conceptual innovation* (inovasi konseptual) merupakan perubahan pada *out look*, seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing.
- f. *Radical change of rationality* (perubahan radikal), yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi pemerintah.

Dalam bukunya Deddy (2016), yang berjudul *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik* menjelaskan birokrasi yang inovatif untuk pelayanan publik yakni:

- a. Tataran individu aparatur meliputi pengetahuan, kemampuan, kompetensi.
- b. Tataran kelembagaan meliputi kepemimpinan, sumber daya, pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen.
- c. Tataran sistem meliputi kerangka aturan, kebijakan pendukung.
- d. Tataran masyarakat meliputi pengetahuan, kontrol, kerjasama, proaktif.

## **5. Strategi Inovasi Dalam Pemerintahan**

Inovasi dalam analisis praktek yang sukses (Sangkala: 2013) menyatakan bahwa terdapat lima strategi utama pada sektor pemerintahan yaitu:

- a. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan. Kewenangan publik seringkali menggabungkan produk dan layanan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Misalnya penggunaan *call center*, *email*, kartu debit, e-government dan lain-lain.

- b. Desentralisasi pemberian layanan dan monitoring layanan, pemenuhan kebutuhan layanan untuk lebih dekat kepada masyarakat dan membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Desentralisasi layanan mendorong pengembangan ekonomi baru. Desentralisasi layanan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kepercayaan dalam pemerintahan.
- c. Pemanfaatan kerjasama, berarti birokrasi yang inovatif dalam memenuhi peningkatan pemenuhan yang efisien untuk pemberian layanan publik, yang lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antar publik dan swasta. Misalnya kolaborasi dengan organisasi bisnis dalam upaya mempromosikan efisiensi dan kualitas layanan administrasi publik.
- d. Pelibatan warga negara adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam kewenangan pemerintah yang inovatif dalam berperan merealisasikan mendorong perubahan. Saat pemerintah mempersiapkan forum bagi publik dalam ekspresikan pandangan dan berperand dalam seluruh langkah-langkah proses, hasil inovasi akan lebih mempunyai kemungkinan untuk sukses dan tersebar luas. Pendekatan partisipasi memungkinkan warga mengungkapkan kebutuhan dan opininya terhadap proposal teknis dan memfasilitasi penerapan proyek yang diberikan dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dari sebuah inovasi perubahan.
- e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. *United Nation World Publik Sector Report* tahun 2004 mencatat penggunaan layanan berbasis

internet untuk memotong red tape dengan cepat keseluruh sektor publik. Kontribusi internet untuk menyederhanakan dan memperbaiki cara warga negara memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan entitas publik. Internet dapat juga bermanfaat sebagai alat perbaikan transparansi dan integritas dalam administrasi publik.

Menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci, inovasi berarti pendayagunaan cara, strategi desain kebijakan baru serta standard operasional sistem baru bagi sektor publik dalam menyelesaikan persoalan publik (Abdillah, 2016). Menurut mereka, poin-poin inovasi sebagai berikut:

- a. Inovasi institutional, yang fokusnya adalah pembaruan lembaga yang telah berdiri atau pendirian institusi baru. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelenggaraan publik perlu dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani anggaran publik.
- b. Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau teknik manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu dan penerapan teknologi baru.
- c. Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian pelayanan. Proses pemberian layanan yang memerlukan inovasi baru dalam hal *service delivery*, efisiensi layanan dan kemudahan akses layanan.

d. Inovasi konseptual, berfokus pada bentuk baru *governance*.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang inovasi maka disimpulkan bahwa inovasi adalah sebuah ide atau pengetahuan baru yang sebelumnya sudah ada akan tetapi masih ingin dikembangkan kembali agar terjadi sebuah perubahan baru. Inovasi dapat diasumsikan sebagai upaya untuk menuju keadaan yang lebih baik semakin inovatif suatu penyelenggaraan pemerintahan semakin besar pula manfaat sebuah nilai tambah bagi masyarakat. Hal ini dapat pula dikembangkan melalui sebuah proses dimana beberapa individu atau kelompok untuk memperoleh sebuah informasi dan wawasan baru serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, untuk menciptakan sebuah kondisi yang tepat dalam mewujudkan inovasi diperlukan individu, kelompok dan organisasi yang memiliki keberanian dalam mengambil resiko. Hasil terobosan seperti disebut inovatif tidak hanya mempertimbangkan kebaruannya tetapi juga terejawantahkan dalam berbagai hal sekalipun dalam sektor swasta. Dimana sebuah inovasi tidak dapat secara serampangan diterjemahkan sebagai hanya “kebaruan” dan “keunikan”, tetapi mesti berhubungan dengan tingkat kinerja dan dampak yang dipertemukan dengan kepentingan publik. Hal seperti inilah merupakan konsekuensi logis dari upaya memberikan nilai tambah terhadap upaya perubahan ke arah “pembaruan” itu sendiri.

## **B. Program**

Menurut Charles o. Jones (Ramandita, 2013:978) program merupakan metode yang berlaku dalam mencapai tujuan, berdasarkan karakteristik khusus

yang membantu dalam mengidentifikasi aktifitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program lazimnya memiliki anggaran, program kadang juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas tersendiri, apabila berlangsung secara efektif apabiladiterima oleh publik.

Selain itu, menurut Arikunto dan Jabar (2009:3) mengatakan bahwa ada dua istilah yang menyatakan program. Program terbagi menjadi arti umum dan khusus, arti umum pengertian program secara umum adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Program apabila dikaitkan dengan inovasi maka program di artikan sebagai kesatuan kegiatan yang merupakanrealisasi atau pelaksanaan suatu kebijakan, yang berlangsung pada proses berkelanjutan dan terjadi pada suatu organisasi terlibat dalam sekelompok orang.

Lebih lanjut Arikunto (2009: 3), berpendapat ada tiga pengertian dan perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan,
2. Program dilaksanakan dalam waktu yang lama bukan hanya satu kegiatan tetapi berkesinambungan, dan
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan beberapa orang atau sekelompok orang. Program diartikan sebagai suatu kesatuan aktivitas yang disebut

sebagai sistem yang terdapat beberapa aktivitas yang dikerjakan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

Pengertian program yang dikemukakan Owen (2006) mengatakan bahwa: *defines a program as: a set of planned activities directed toward bringing about specified change (s) in an identified and identifiable audience. This Suggests that a program has two essential components: a documented plan; and action consistent with the documentation contained in the plan.* Dapat diartikan bahwa program merupakan seperangkat kegiatan rencana yang diarahkan untuk membawa sebuah perubahan yang ditentukan dan diidentifikasi melalui audiens yang teridentifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah program memiliki dua komponen yang terdiri dari rencana yang terdokumentasikan dan tindakan yang sesuai dengan dokumentasi yang ada pada rencana tersebut.

Senada dengan pendapat di atas maka Ashiong (2015:4) mengemukakan bahwa program adalah serangkaian kegiatan sistematis yang direncanakan, adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran target atau tujuan, adanya kebutuhan yang spesifik, adanya partisipasi individu atau kelompok, adanya konteks tersendiri, menghasilkan keluaran terdokumentasi, hasil dan dampak, adanya sistem yang terlaksana dalam program kerja, dan bermanfaat.

Menurut Donald B. Yarbrough dkk (2010), bahwa: *program a the systematic application of resources guided by logic, beliefs, and assumption identifyng human needs and factors related to them. Defined completely, a program is* (program merupakan sebuah aplikasi sistematis sumber daya yang

dipandu oleh logika, keyakinan, dan asumsi yang mengidentifikasi kebutuhan dan faktor manusia yang terkait dengannya didefinisikan sepenuhnya, sebuah program adalah):

1. *Set of planned systematic activities* (Mengalur aktivitas secara sistematis dan terencana).
2. *Using managed resources* (Menggunakan sumber yang terkelola).
3. *To achieve specified goals* (Untuk mencapai tujuan tertentu).
4. *Related to specific needs* (Berhubungan dengan kebutuhan secara spesifik (khusus)).
5. *Of specific, identified, participating human individuals or groups* (Mengidentifikasi, terlibat dalam kelompok atau individu).
6. *In specific contexts* (Dalam konteks yang spesifik).
7. *Resulting in documentable outputs, outcoms, and impacts* (Menghasilkan output (keluaran) yang berpengaruh kuat).
8. *Following assumed* (Mengikuti pendapat).
9. *With specific, investigable costs and benefits* (Memperhatikan biaya dan kemanfaatan).

Dapat bermakna program merupakan aplikasi yang tersusun dari sumber daya yang berdasarkan sebuah logika, asumsi dan keyakinan identifikasi kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah disebutkan. Program juga diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang terencana, adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran tujuan, adanya

konteks tertentu yang menghasilkan keluaran terdokumentasi, hasil, dan dampak, adanya sistem keyakinan yang terimplementasi dengan program kerja, dan memiliki manfaat.

Menurut Muhaimin (2009: 349) program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan beberapa harapan atau tujuan saling berkaitan dan saling tergantung, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama dan saling melengkapi, sehingga semuadapat dilaksanakan secara berurutan.

Menurut Charles O. Jones (Siti, 2009: 28) terdapat tiga asas aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang terbuka diperlukan untuk menjalankan program sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pengelola harus mampu melaksanakan program sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Penting adanya produksi kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang program maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan sebuah bentuk rencana kegiatan secara sistematis

yang mempunyai sumber daya yang mendukung dan mampu dikelola baik secara individu maupun secara kelompok yang mempunyai sasaran target ataupun tujuan yang ingin dicapai.

### **C. Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'SIBALI) Kabupaten Gowa**

Gowa merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dikawasan Indonesia Timur, di antara Kabupaten yang lain yang terletak di Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa mengalami masalah dalam Program Desa Siaga Lingkungan khususnya di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa merupakan Desa yang tidak termasuk dalam area terlindungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dikarenakan Desa ini sangat sulit dijangkau kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran yang masih terbatas baik dari segi unit mobil Pemadam Kebakaran maupun jarak lokasi yang sangat sulit untuk ditempuh. Kondisi seperti inilah pemerintah harus berperan penting dalam Program Desa Siaga Lingkungan sehingga dengan adanya Program ini diharapkan menjadi sebuah Inovasi baru, karena para barisan relawan inilah yang nantinya turun langsung pertamakali melakukan pemadaman sebelum Dinas Kebakaran Kabupaten Gowa tiba dilokasi kebakaran. Menurut Syamsul Bahri (Kepala Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran) Kabupaten Gowa mengatakan bahwa hadirnya ataupun dibentuknya Balakar ini mengacu pada lima darma yang pertama adalah pencegahan, kedua adalah pengendalian dan penanganan kebakaran, ketiga adalah penyelamatan berupa jiwa dan harta benda, keempat adalah

pemberdayaan masyarakat, kelima adalah penanganan bahan berbahaya dan beracun. Keterkaitan dengan pembentukan desa siaga kebakaran lingkungan mengacu pada dua darma yaitu darma yang pertama adalah pencegahan kemudian darma yang ke empat pemberdayaan masyarakat jadi program D'Sibali ini diharapkan adanya upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan ataupun pemahaman langsung agar ketika terjadi musibah kebakaran masyarakat bisa turun langsung dalam memberikan bantuan sebelum dinas pemadam kebakaran tiba kelokasi kebakaran yang bertanggung jawab dalam hal pencegahan kebakaran bukan hanya dinas pemadam kebakaran saja tetapi pemerintah dan unit usaha pun terlibat dalam memberikan pertanggung jawaban (Syukri,2017).

Dengan hadirnya Balakar ini adalah upaya untuk membantu petugas Pemadam Kebakaran yang beranggotakan sebanyak 11 orang yang ditetapkan oleh D'Sibali yang harus sigap siaga dalam menanggulangi bencana yang telah terjadi dilingkungan masyarakat. Dengan demikian Desa Sunggumanai merupakan Desa yang pertamakali yang mempunyai Program Balakar yang dibentuk atas usulan kepala Desa Sunggumanai kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa yang ditetapkan sebagai D'Sibali, oleh sebab itu disini kita ingin lakukan sebuah Inovasi Program Desa Siaga Lingkungan D'Sibali di Kabupaten Gowa agar dengan adanya program Balakar ini mampu memberikan bantuan kepada desa-desa lain yang terkena musibah

#### D. Kerangka Pikir

Inovasi program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) diartikan sebagai aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien dan berkualitas, murah dan terjangkau. Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan adalah program yang bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran yang melibatkan seutuhnya masyarakat desa sunggumanai untuk ikut serta dalam menangani bencana kebakaran ataupun musibah lainnya yang ada di desa. Indikator inovasi yang akan digunakan adalah teori menurut Robbins & Coulter, dimana terdapat tiga indikator dalam inovasi yaitu:

**Gambar 3 Kerangka Pikir**



## **E. Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka fokus penelitian dengan judul “Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan D’Sibali Di Kabupaten Gowa” adalah sebagai berikut.

1. Struktur Inovasi meliputi
  - a. Ketersediaan sumber daya manusia
  - b. Komunikasi
  - c. Organisasi
2. Budaya Inovasi meliputi
  - a. Menoleransi resiko
  - b. Menoleransi konflik
3. Sumber daya inovasi
  - a. Pelatihan-pelatihan
  - b. Memberikan keamanan kerja

## **F. Deskriptif Fokus Penelitian**

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas dapat dikemukakan definisi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Inovasi program dalam penelitian ini merupakan pembaharuan ide atau gagasan pemikiran baru pada program kebijakan publik yang sudah ada sebelumnya untuk menyelesaikan masalah publik.
2. Program Desa Siaga kebakaran lingkungan D’Sibalidi Kabupaten Gowa dalam penelitian ini merupakan sebuah program yang dibentuk atas usulan

kepala Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk dapat berperan langsung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Oleh karena itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa membuat sebuah tim yang bernama Balakar yang beranggotakan 11 orang inilah yang nantinya terjun langsung kelokasi untuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah.

3. Struktur Inovasi dalam penelitian ini merupakan terdiri dari :
  - a. Ketersediaan sumber daya manusia dalam penelitian ini dibutuhkan karna adanya Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan ini dapat membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam, terkhusus bencana kebakaran yang ada di Desa Sunggumanai Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu: Masyarakat Desa, Tim Balakar, Dinas Pemadam Kebakaran Kepala Desa Sunggumanai.
  - b. Komunikasi pada penelitian ini adalah sebuah proses penyampaian informasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran apabila terjadi sebuah musibah kebakaran atau bencana maka masyarakat wajib menghubungi nomor yang tertera 0411861036 agar Dinas Pemadam Kebakaran dapat segera tiba kelokasi setempat. Dengan adanya laporan dari masyarakat kepada tim baerisan relawan pemadam kebakaran kemudian tim Balakar turun langsung memberikan penanganan dini kepada masyarakat.
  - c. Organisasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa sebagai tempat atau wadah berkumpulnya bagi Dinas Pemadam Kebakaran menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam

menanggulangi bencana lingkungan dan kebakaran di Kabupaten Gowa. Adapun organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa sunggumanai adalah tim barisan relawan pemadam kebakaran (Balakar).

4. Budaya Inovasi dalam penelitian ini adalah pembaharuan pola perilaku yang menjadi cara hidup atau kebiasaan dalam Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa, meliputi;

a. Menoleransi resiko dalam penelitian ini adalah menerima masalah yang mungkin saja terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa. Adapun bentuk pelatihan-pelatihan mengenai pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan program ini.

b. Menoleransi konflik dalam penelitian ini merupakan menerima perselisihan yang sedang terjadi antara masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dalam suatu permasalahan dimana kedua bela pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Adapun yang menjadi permasalahan dalam program ini yaitu: Kurangnya komunikasi, Minimnya ketersediaan alat-alat pemadam kebakaran dan Keterbatasan dana yang ada.

5. Sumber daya Inovasi dalam program ini yaitu pelatihan-pelatihan dan memberikan keamanan kerja yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara penanggulangan dini terhadap musibah kebakaran ataupun musibah alam lainnya yang

meliputi pencegahan kebakaran, pemadaman, penyelamatan korban dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Memberikan keamanan kerja berupa tunjangan asuransi BPJS ketenagakerjaan yang hanya diberikan kepada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 2 bulan. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jl. Tumanurung Raya Kabupaten Gowa dan Masyarakat serta Pemerintah Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa sebagai sasaran utama penelitian. Lokasi penelitian sangat strategis karena penelitian ini didukung oleh fakta-fakta atau data identik mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dalam hal ini “Inovasi program siaga lingkungan D’SIBALI di Kabupaten Gowa”. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta tentang inovasi kebijakan program D’SIBALI dan penelitian pustaka (*liberary research*) guna memperoleh data secara teoritis mengenai inovasi program dengan cara menggunakan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat.

#### **C. Sumber Data**

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui hasil penelitian langsung dilokasi penelitian melalui hasil observasi dan wawancara.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian seperti; buku, peraturan-peraturan undang-undang, jurnal, artikel, berita dan internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang benar-benar mengetahui dan memahami objek penelitian sesuai kebutuhan penelitian tentang Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan D'sibali Di Kabupaten Gowa. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa informan penelitian yang terdiri atas:

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1	Rostam Razak	RR	Kepala Dinas
2	Mustamin Raga	MR	Kepala Bidang Pencegahan
3	Syamsul Bahri, SH	SB	Kepala Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran
4	Misbahuddin. Sos	MS	Bendahara Penerima
5	Muhammad Alief	MA	PROVOS
6	Sofyan	SF	Anggota Penyelamat Resque

7	Abd. Rivai Rasyid	AR	Kepala Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa
8	ADB. Rahim Dg Bali	RB	Ketua Balakar
9	Burhanuddin	BU	Anggota Balakar
10	Dg. Kulle	DK	Tokoh Masyarakat
11	Ismail	IS	Tokoh Masyarakat
12	Dg Sarro	DS	Tokoh Agama

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen penelitian melalui pedoman untuk wawancara yang dilakukan secara mendalam pada informan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data observasi *participant*, wawancara secara mendalam, sehingga perlu dikemukakan apa yang diobservasi dan kepada siapa akan melakukan wawancara.

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dan mengadakan pengamatan langsung lapangan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan permasalahan yang teliti.
2. Interview (Wawancara) secara terstruktur yaitu cara pengumpulan data dengan memperoleh data melalui wawancara terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara kepada responden mengenai inovasi program

Desa siaga kebakaran lingkungan D'SIBALI di Kabupaten Gowa khususnya di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa .

3. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian yang diangkat di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono :2011) terdapat tiga tipe teknik analisis data kualitatif yaitu

1. Mereduksi data

Data yang didapatkan di lapangan jumlahnya telah menumpuk oleh sebab itu, seharusnya secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memisahkan hal yang penting, memfokuskan pada hal yang pokok dari topic dan model serta membuang yang tidak perlu.

2. Sajian data

Sajian data merupakan suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Adalah langkah akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan penyajian data.

## **G. Pengabsahan Data**

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan dan kredibilitas data hasil penelitian adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dilakukan sebagai pengecekan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2012).

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilaksanakan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik adalah bentuk pengujian keabsahan data yang dilaksanakan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.

### **3. Triangulasi Waktu**

Triangulasi Waktu digunakan untuk mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara kepada informan dilakukan berdasarkan keinginan informan seperti; wawancara dapat dilakukan waktu yang tetap pada saat narasumber merasa nyaman dan rileks sehingga data yang diperoleh akan lebih valid dan kredibel.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada  $119.3773^{\circ}$  Bujur Barat dan  $120.0317^{\circ}$  Bujur Timur,  $50829342862^{\circ}$  Lintang Utara dan  $5,577305437^{\circ}$  Lintang Selatan. Dimana wilayahnya terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah  $1.883,32 \text{ km}^2$ , atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara administratif Kabupaten Gowa mempunyai batas-batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan parangloe, mamuju, tinggimoncong,

tombolobulu dan biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan somba opu, bontomarannu, patallasang, pallangga, barombong, bajeng, bajeng barat, bontonompo dan bontonompo selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu diwilayah kecamatan parangloe, tinggimoncong, bungaya dan tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km dengan panjang 90 km.

## **2. Profil Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa**

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran. Pasukan berbaju biru ini merupakan para kesatria penantang api yang bekerja selama 24 jam dengan Slogan “Pantang Pulang Sebelum Padam”. Awalnya Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten Gowa berada dibawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 kemudian pada bulan januari 2017 Pemadam Kebakaran mampu berdiri sendiri menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok dan fungsi

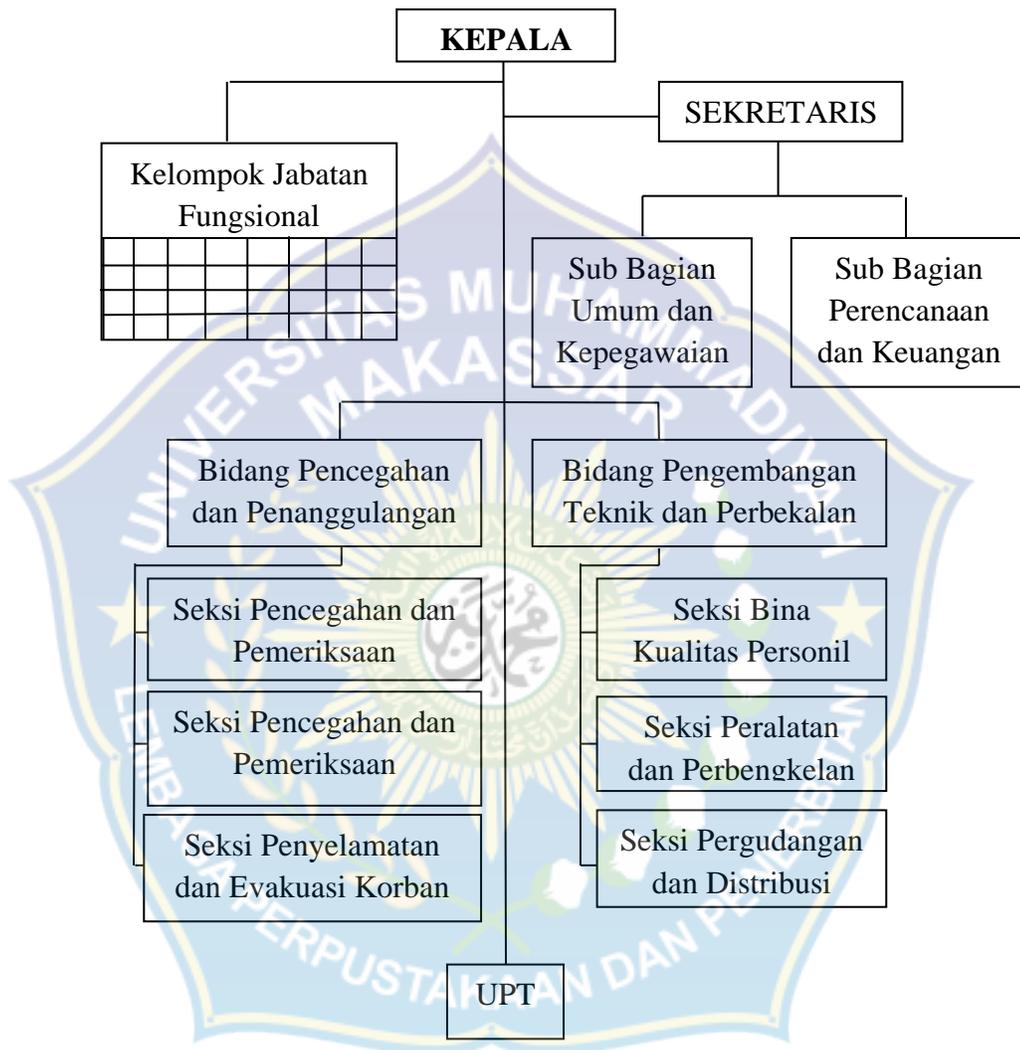
menyelenggarakan urusan dibidang pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran di masyarakat. Adapun Visi Dinas Pemadam Kebakaran yaitu “Terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik” Sedangkan Misi Dinas Pemadam Kebakaran adalah:

- a. Menyelenggarakan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, serta penanganan bahan berbahaya dan beracun yang efektif, efisien, terarah dan modern dengan melibatkan seoptimal mungkin, pemberdayaan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan kapasitas masyarakat serta melaksanakan penelitian dan pengembangan.
- c. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- d. Meningkatkan interkoneksi wilayah maupun antar lembaga dalam pelayanan pemadam kebakaran.

#### **1) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang penataan organisasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 11 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Gowa, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan dibidang

pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran di masyarakat dengan susunan organisasi yang ada dibawah:



Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran

## 2) Pembagian Tugas

Adapun uraian tugas tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknik dinas dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kesekretariatan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan dibidang kesekretariatan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan kebijakan, dan rencana kegiatan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengarahkan, mengkoordinasikan, membina,

mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan program dan pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas pada bidang-bidang lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan, pengkoordinasian, penyusunan program dan rencana kerja;
- 2) Pelaksanaan, pengkoordinasian, dan penyusunan pelaporan kegiatan;
- 3) Pelaksanaan, pengkoordinasian, pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- 4) Pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 5) Pembinaan monitorin, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemberian bimbingan dibidang pengelolaan administrasi umum,

tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencana dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemberian bimbingan dibidang perencanaan program dan pengelolaan keuangan, serta pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

e. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan tugas pokok membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan dan rencana operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, melaporkan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud kepala bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup pencegahan dan pemeriksaan, pengendalian operasional kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban;

- 2) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pencegahan dan pemeriksaan, pengendalian operasional kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban;
- 3) Pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemeriksaan, pengendali operasional kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban;
- 4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemeriksaan, pengendalian operasional kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban.

f. Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan

Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kepala seksi pencegahan dan pemeriksaan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup pencegahan dan pemeriksaan.

g. Seksi Pengendalian Operasional Pemadam Kebakaran

Seksi Pengendalian Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kepala seksi pengendalian operasional kebakaran mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup pengendali operasional kebakaran.

#### h. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kepala seksi penyelamatan dan evakuasi korban mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup penyelamatan dan evakuasi korban.

#### i. Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan

Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan tugas pokok membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup bidang pengembangan teknik dan perbekalan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud kepala bidang pengembangan teknik dan perbekalan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan dan penyusunan program dan rencana kerja lingkup Bina Kualitas Personil, Peralatan dan Perbengkelan, Pergudangan dan Distribusi Logistik;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup bina kualitas personil, peralatan dan perbengkelan, pergudangan dan distribusi logistik;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dalam pengembangan teknik dan perbekalan;

- 4) Pelaksanaan lingkup bina kualitas personil, peralatan dan perbengkelan, pergudangan dan distribusi logistik;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pengembangan teknik dan perbekalan;
- 6) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kualitas personil, peralatan dan perbengkelan, pergudangan dan distribusi logistik;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

j. Seksi Bina Kualitas Personil

Seksi Bina Kualitas Personil dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengembangan teknik dan perbengkelan. Kepala seksi bina kualitas personil mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup bina kualitas personil;

k. Seksi Peralatan dan Perbengkelan

Seksi Peralatan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengembangan teknik dan perbengkelan, kepala seksi peralatan dan perbengkelan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup peralatan dan perbengkelan;

1) Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik

Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengembangan teknik dan perbengkelan. Kepala seksi pergudangan dan distribusi logistik mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup pergudangan dan distribusi logistik.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan baik secara berkala maupun insidental tepat pada waktunya.

### **3. Profil Kantor Desa Sunggumanai Kecamatan Patallasang Kabupaten Gowa**

Pada tahun 1992 Desa Sunggumanai Kecamatan Patallasang Kabupaten Gowa merupakan Desa persiapan pemekaran dari Desa Timbuseng merupakan Desa dari Kecamatan Bontomarannu. Pada tahun 1999 Desa Sunggumanai defenitif dan melakukan pemilihan kepala desa pertama, selanjutnya pada tahun 2002 Desa Sunggumanai dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Borong Pala'la dan Desa Sunggumanai Kecamatan Bontomarannu. Pada tahun 2004 kecamatan Bontomarannu dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Patallasang, dan desa sunggumanai termasuk bagian dari wilayah Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa.

Visi Desa Sunggumanai Tahun 2016-2021 yaitu: “Terwujudnya Desa Sunggumanai yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan”

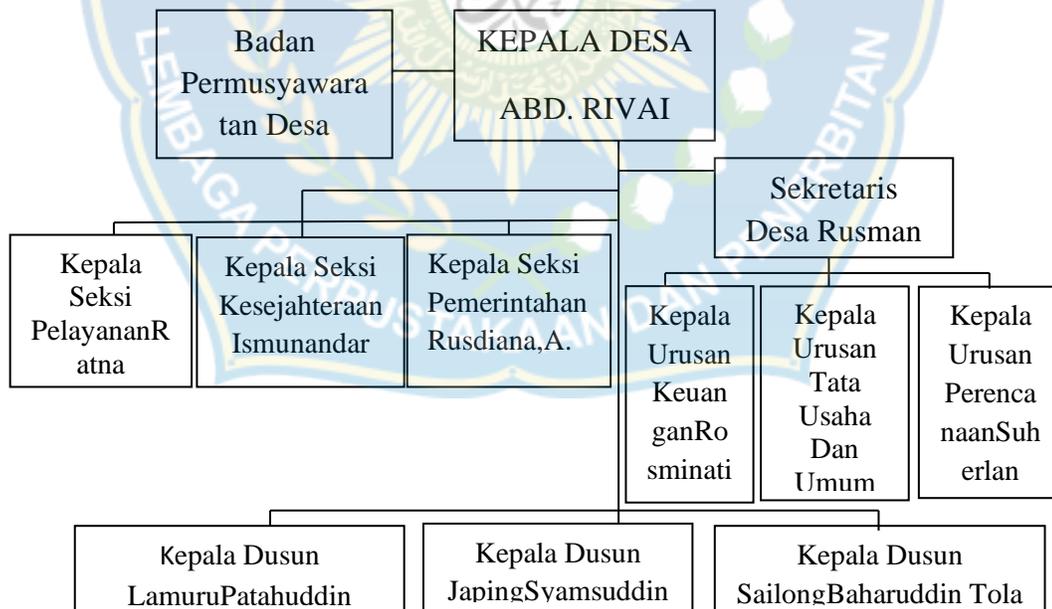
Misi Desa Sunggumanai Tahun 2016-2021 yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat.
- b. Meningkatkan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- c. Meningkatkan penguatan kelembagaan desa dan peran masyarakat.
- d. Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi.

- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.

**1) Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sunggumanai**

Susunan organisasi tata kerja pemerintah desa di atur dengan permendagri No. 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. Peraturan menteri dalam negeri tentang SOTK desa di undangkan dalam berita Negara tahun 2016 No. 6. Permendagri SOTK desa menuntut aturan dari bupati atau walikota tentang penetapan SOTK desa, dan Peraturan Bupati Atau Walikota tentang penetapan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak permendagri No. 84 atau 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa di undangkan pada 5 Januari 2016.



Gambar 5 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sunggumanai

## **B. Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) di Kabupaten Gowa**

Inovasi program dilakukan untuk mengetahui apakah proses pengimplementasian suatu gagasan baru yang memiliki unsur kebaruan kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang diharapkan. Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan ini merupakan program dari Kantor Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa yang kemudian turun ke Kecamatan Patallasang kemudian langsung turun ke Desa Sunggumanai Kecamatan Patallasang Kabupaten Gowa. Program ini dibuat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana tata cara pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

### **1. Struktur Inovasi**

Indikator struktur inovasi dalam teori Robbins & Coulter (2010) adalah ketersediaan sumber daya manusia, komunikasi dan organisasi. Inovasi program desa siaga kebakaran lingkungan dilakukan dengan melihat sumber daya manusia yang berperan dalam program ini selain itu untuk mengetahui seperti apa komunikasi yang terjalin dan organisasi yang dibentuk dalam program ini.

Tabel 3 : Deskripsi Struktur Inovasi berdasarkan sumber daya manusia, komunikasi dan organisasi dalam inovasi program desa siaga kebakaran lingkungan di Kabupaten Gowa.

INFORMAN	KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA	KOMUNIKASI	ORGANISASI
Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Gowa	Masyarakat Desa Tim Balakar Dinas Pemadam Kebakaran Kepada Desa Sunggumanai	Komunikasi langsung dengan masyarakat	Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran
Pemerintah Desa Sunggumanai Kab. Gowa	Tim Balakar Masyarakat	Tim balakar turun langsung mensosialisasikan kepada masyarakat	Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran
Barisan Relawan Pemadam Kebakaran	Masyarakat Sosialisasi dari Dinas Pemadam Kebakaran	Adanya laporan dari masyarakat kepada Tim Balakar	Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran
Masyarakat	Tim Balakar Dinas Pemadam Kebakaran Kepala Desa Sunggumanai	Laporan masyarakat kepada Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran	Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran

Sumber: Hasil reduksi data 2019

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa struktur pada inovasi yang berupa pada ketersediaan sumber daya manusia, dana maupun sarana dan prasarana dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan dilihat dari hasil wawancara dibawah ini.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan SB dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan sumber daya manusia mengatakan bahwa :

“...Sehubung dengan ketersediaan sumber daya inilah yang kita pedomani yang ada lima panca darma yang pertama pencegahan kebakaran dan darma yang ke empat itu pemberdayaan masyarakat oleh karena itu ketersediaan sumber daya kami yaitu sangat jauh dibawah standar sebagai SKPD yang baru, sehingga ketersediaan sumber daya ini diharapkan kepada ee pemerintah desa khususnya pemerintah desa Sunggumanai untuk ee membantu kami dalam upaya-upaya

mendekatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi tentu ini harapaun kita semua selaku pemerintah baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah desa untuk mendekatkan pelayanan pemerintah desa ini kepada masyarakatnya tentu ia harus memberdayakan ee masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat inilah sebagai sumber daya dalam mendukung Inovasi Program D'sibali ini jadi masyarakat itu diberdayakan melalui dibentuknya tim barisan relawan pemadam kebakaran atau tim balakar sebagai pemberdayaan masyarakat sehingga kami diharapkan pemerintah desa memberdayakan masyarakatnya sendiri untuk menjalankan program D'sibali ini (Hasil wawancara dengan informan SB pada tanggal 08 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa sumber daya manusia dalam program desa siaga kebakaran lingkungan yaitu Masyarakat Desa, Tim Balakar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepala Desa Sunggumanai. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Desa Sunggumanai informan AR mengatakan bahwa:

“...upaya-upaya untuk menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran dan membuat suatu inovasi yang namanya Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) dengan ketersediaan sumber daya manusia ini kita didukung oleh inovasi tersebut untuk mendirikan sebuah ee namanya organisasi Balakar. Jadi tujuan dari dibentuknya Balakar ini yang pertama adalah bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman kebakaran serta ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu dibentuk Balakar ini yang kedua ialah maka perlu dipandang bahwa e dengan adanya hal tersebut maka kami membuat surat keputusan kepala desa terkait dengan Balakar nomor 15 tahun 2017 (Hasil wawancara dengan informan AR pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam program desa siaga kebaran lingkungan ini yaitu Tim Balakar dan Masyarakat. Hal tersebut diatas senada dengan apa yang dijelaskan dengan informan RB dari Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa kinerja yang dilakukan Damkar ini sangat luar biasa karena kita tim balakar dari desa sunggumanai ini di panggil ke kantor Damkar untuk diajarkan atau diberikan pemahaman mengenai cara memadamkan api dan fungsi balakar tersebut dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah (Hasil wawancara dengan informan RB pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui bahwa tim balakar desa sunggumanai diberikan pelatihan-pelatihan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran mengenai sosialisasi penanganan kebakaran kepada masyarakat.

Hasil wawancara lainnya dengan informan IS dari masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya Program D’Sibali yang dibentuk di desa ini yang diberi nama Balakar (Barisan Relawan Kebakaran) yang beranggotakan 11 orang sangat membantu kita dalam hal ketika terjadi yang namanya musibah kebakaran karena tim Balakar inilah yang turun langsung memberikan bantuan kepada kita sebelum tim dari Dinas Pemadam Kebakaran tiba kelokasi terjadinya kebakaran. Apalagi belum berapa hari dibentuk tim Balakar sudah terjadi musibah kebakaran yang terjadi di Dusun Jipang tepatnya di Desa Sunggumanai ini, awal terjadinya kebakaran tersebut di akibatkan karna arus pendek listrik kejadiannya terjadi pada malam hari sekitar jam 11 malam jadi korban yg kebakaran rumahnya itu tidak dapat menyelamatkan barang-barang berharganya karna pada saat itu dia sudah terlelap tidurnya dan untungnya tetangga dekat rumahnya itu langsung berteriak kebakaran dan semua warga merasa kaget dan panik melihat kobaran

api. Untungnya tim ini langsung ketempat lokasi kejadian kebakaran dan memberikan bantuan langsung dengan dibantu oleh masyarakat setempat(Hasil wawancara dengan informan IS pada tanggal 19 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Inovasi yang berupa Sumber Daya Manusia dalam program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu Dinas Pemadam Kebakaran bekerjasama dengan pemerintah Desa Sunggumanai dalam membentuk Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran yang bertugas membantu masyarakat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sebelum Dinas Pemadam Kebakaran tiba di lokasi terjadinya musibah kebakaran.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan RR dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan komunikasi mengatakan bahwa:

“Menegenai masalah kebakaran yang sering terjadi dilingkungan masyarakat kita dari dinas pemadam kebakaran 24 jam selalu siap tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gowa. Kita dapat pula mengacu pada Permen PU terkait masalah manajemen proteksi kebakaran wilayah perkotaan dan yang kedua adalah manajemen proteksi upaya kebakaran pada pembangunan atau kawasan bangunan gedung, kemudian kita juga berpedoman kepada kementerian ketenagakerjaan UU No.1 tahun 70 tahun K3 tentang keselamatan dan kesiapan kerja itulah yang menjadi pedoman kerja kita (Hasil wawancara dengan informan RR pada tanggal 14 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa komunikasi yang terjalin dalam program Desa Siaga bencana Kebakaran yaitu Dinas Pemadam Kebakaran menjalin kerjasama dengan pemerintah Desa Sunggumanai

membentuk Tim Balakar. Dimana sebelum Dinas Pemadam Kebakaran datang ke lokasi kebakaran masyarakat terlebih dahulu melaporkan musibah kebakaran ini kepada tim Balakar. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari Pemerintah Desa Sunggumanai yang mengatakan bahwa:

“Mengenai hambatan mengenai program ini kami senang tiasa melakukan informasi minimal satukali dalam satu bulan terkait dengan kegiatan Balakar ini dan setiap kegiatan ini para tim Balakar turun mensosialisasikan kepada masyarakat terkait cara-cara pencegahan ee bahaya kebakaran khususnya bagi perumahan pemukiman warga dan kami sangat menginspirasi para tim balakar karna dia sangat aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tata cara mengantisipasi kebakaran yang sewaktu-waktu akan terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri (Hasil wawancara dengan informan AR pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa struktur inovasi berupa komunikasi dalam program desa siaga lingkungan kebakaran yaitu sosialisasi langsung yang dilakukan kepada masyarakat memberikan pemahaman terkait dengan cara penanganan dini mengantisipasi bencana kebakaran.

“Dengan adanya program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan ini yang dibentuk di desa kami segenap tim anggota dari Balakar sangat berantusias dalam program tersebut karena kami disini diberikan sebuah pembinaan dan penanganan dini terhadap bahaya kebakaran. Jadi ketika terjadi musibah kebakaran yang terjadi dilingkungan masyarakat itu sudah menjadi tugas kami sebagai relawan masyarakat ketika terjadi musibah kebakaran sebelum Dinas Pemadam Kebakaran tiba ke lokasi kejadian kitalah yang harus memberikan penanganan dini kepada masyarakat ketika terjadi musibah kebakaran(Hasil wawancara dengan informan RB pada tanggal 27 Maret 2019)”

Hasil wawancara lainnya dengan masyarakat informman IS yang mengatakan bahwa:

“saya pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran di desa sunggumanai mengenai masalah pencegahan kebakaran yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi setelah dibentuknya ini balakar nak saya sudah mengetahui bahwa ketika terjadi kebakaran kita bisa menggunakan alat-alat rumah tangga, seperti halnya ember, timba, kain basah, dan karung goni. Itu semua nak bisa digunakan untuk memadamkan api kecil (Hasil wawancara dengan informan IS pada tanggal 19 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi berupa komunikasi dalam program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan komunikasi yang terjalin antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Pemerintah Desa Sunggumanai menghasilkan dibentuknya tim Balakar yang membantu tugas dinas pemadam kebakaran yang bisa turun langsung dimasyarakat menjangkau daerah yang sulit dijangkau dinas pemadam kebakaran.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan SB dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan Organisasi mengatakan bahwa:

“Ya jadi sejak awal pembentukan Program Inovasi ini kita melibatkan seluruh stekholder yang ada baik itu ee pada SKPD pemberdayaan masyarakat desa (PMD), kemudian pemerintah desa melalui kecamatan untuk melakukan sosialisasi terkait program desa siaga kebakaran lingkungan di desa sunggumanai kecamatan patallasang sehingga pada sosialisasi yang kita lakuakan ini melibatkan juga ramil setempat, Polsek, dan ee seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada sehingga ee kegiatan ini selesai di kecamatan maka kita akan implementasikan ketingkat desa yang lebih dekat lagi pelayanannya kepada masyarakat. Pemerintah desa melalui kepala desa maupun Babinsa dan

Babinkadikmas (Hasil wawancara dengan informan SB pada tanggal 08 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa organisasi dalam Program Desa siaga Lingkungan Kebakaran yaitu masyarakat Desa, Tim Balakar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepala Desa Sunggumanai. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pemerintah Desa Sunggumanai informan AR mengatakan bahwa:

“Saya rasa kami di Desa Sunggumanai sudah membentuk tim barisan relawan kebakaran (Balakar) sejak tahun 2017 kenapa kami lakukan karena beberapa pengalaman lalu yang pernah terjadi kebakaran khususnya di wilayah desa kami sunggumanai ini pada tahun 2014 beberapa kejadian kebakaran pemukiman warga yang habis hangus dilalap api dan kemudian pada tahun 2016 dua kali berturut-turut terjadi kebakaran olehnya itu kami ee mengambil suatu inisiatif kebijakan untuk membentuk barisan relawan pemadam kebakaran ini dan kami sangat apresiasi juga dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa yang sangat mendukung organisasi yang kami bentuk ini dalam rangka upaya pencegahan-pencegahan atau antisipasi terjadinya musibah kebakaran (Hasil wawancara AR pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas menyatakan bahwa organisasi dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan ini yaitu Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran. Hal tersebut diatas senada dengan apa yang dijelaskan dengan informan BH dari Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran yang mengatakan bahwa:

“Kami dari anggota barisan relawan pemadam kebakaran yang telah dibentuk oleh kepala desa kami sendiri sangat bersyukur karena kami mendapatkan banyak pengetahuan mengenai masalah pencegahan kebakaran yang

telah diberikan pembinaan dari para anggota dinas pemadam kebakaran kabupaten gowa (Hasil wawancara BH pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan hasilwawancaradengan informan diatas maka dapat diketahui bahwa tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran desa sunggumanai merupakan organisasi yang telah dibentuk di Kantor Desa Sunggumanai Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa.

Hasil wawancara lainnya dengan informan DS dari masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah dengan adanya Program D’Sibali ini bisa membentuk tim yang namanya balakar yang telah dibentuk didesa sangat membantu kita dalam hal pencegahan kebakaran yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kab. Gowa ini (Hasil wawancara dengan informan DS pada tanggal 19 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Inovasi berupa Organisasi dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu Dinas Pemadam Kebakaran bekerjasama dengan pemerintah desa sunggumanai sehingga terjalinlah tanda tangan kontrak (MOU) yang telah disepakati oleh pihak pemerintah desa dengan anggota damkar sehingga terbentuklah organisasi yang diberi nama Barisan Relawan Pemadam Kebakaran.

## 2. Budaya Inovasi

Indikator budaya inovasi dalam teori Robbins & Coulter (2010) adalah menoleransi resiko dan menoleransi konflik. Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan dilakukan dengan melihat menoleransi resiko yang berperan dalam ini selain itu untuk mengetahui menoleransi konflik yang dibentuk dalam program ini.

Tabel 4 : Deskripsi Budaya Inovasi berdasarkan menoleransi resiko dan menoleransi konflik dalam Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan di Kabupaten Gowa.

INFORMAN	MENOLERANSI RESIKO	MENOLERANSI KONFLIK
Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Gowa	Melakukan pelatihan-pelatihan mengenai pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan pemberdayaan masyarakat.	Kurangnya komunikasi Minimnya ketersediaan alat-alat pemadam kebakaran Keterbatasan dana yang ada
Pemerintah Desa Sunggumanai Kab. Gowa	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan bahaya kebakaran Melakukan pelatihan tim Balakar	Masih kurangnya penyediaan alat-alat
Barisan Relawan Pemadam Kebakaran	Melakukan pelatihan di kantor dinas pemadam kebakaran kabupaten gowa	Minimnya ketersediaan alat-alat pemadam kebakaran
Masyarakat	Melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat melalui pemerintah desa. Pemberian pemahaman mengenai cara penanggulangan dini terhadap bencana kebakaran.	Masih kurangnya alat pemadam kebakaran yang disediakan oleh pemerintah setempat.

Sumber: Hasil data 2019

Pada table diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa budaya inovasi yang berupa pada menoleransi resiko dan menoleransi konflik dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan dilihat dari hasil wawancara dibawah ini.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh informan SB dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait mengenai dengan menoleransi resiko mengatakan bahwa :

“Jadi inovasi ini yaa kita berbicara masalah resiko mengenai program D’Sibali ini tentu saya rasa dari tingkat resiko dari pada fungsi-fungsi dari program ini tentu tidak terlalu berdampak pada masyarakat karena kami hanya membutuhkan menyiapkan waktu untuk berkomunikasi dengan kami. Sehingga ketika kita bicara mengenai resiko bahwa disetiap kegiatan itu menimbulkan biaya-biaya pada saat melaksanakan kegiatan akan tetapi pada program D’Sibali ini kita lakukan dan akan menunjukkan eee keberhasilan dari inovasi program ini yaitu dalam membangun program ini awal dari pada program ini kita jalankan sampai tidak menimbulkan resiko, tidak menimbulkan biaya kami hanya mengharapkan kehadiran atau partisipasi masyarakat untuk bisa bertemu langsung kepada kami dalam hal memberikan informasi terkait program ini (Hasil wawancara dengan informasi SB pada tanggal 08 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa menoleransi berisiko dalam Program Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu melakukan pelatihan-pelatihan mengenai pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Desa Sunggumanai informan AR mengatakan bahwa :

“...Jadi di Desa Sunggumanai ini telah menyelesaikan pelatihan yang dilakukan oleh Damkar itu sendiri dan saat ini sedang melaksanakan program-program dalam membantu masyarakat akan bahaya kebakaran yang sering terjadi di pemukiman warga dan saya kira ada beberapa tugas Balakar dimana yang

pertama itu adalah membina dan memelihara, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana baik bencana alam maupaun bencana karna ulah manusia sendiri, yang kedua adalah mengkoordinasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas, dan elemen-elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini dimasyarakat di sunggumanai ini. Yang ketiga adalah menjanging, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan gejala atau peristiwa lainnya dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini (Hasil wawancara dengan informan AR pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas menyatakan bahwa menoleransi resiko dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu melakukan pelatihan dikantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa. Hal tersebut senada dengan apa yang dijelaskan dengan informan RB dari tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran yang menyatakan bahwa

“Saya rasa kinerja yang dilakukan Damkar ini sangat luar biasa karena kita tim balakar dari desa sunggumanai ini di panggil ke kantor Damkar untuk diajarkan atau diberikan pemahaman, pembinaan mengenai cara memadamkan api, bagaimana cara memberikan pertolongan langsung kepada masyarakat, bagaimana cara agar tidak panik ketika melihat kobaran api dan fungsi balakar tersebut dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah terkhusus mengenai musibah kebakaran (Hasil wawancara dengan informan RB pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat diketahui bahwa tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Sunggumanai melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat melalui pemerintah desa dan memberikan

pemahaman di kantor Damkar mengenai cara penanggulangan dini terhadap bencana kebakaran serta cara memberikan pertolongan kepada masyarakat.

Hasi wawancara lainnya dengan informan DS dari masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Ya saya rasa nak dengan dibentuknya Para Barisan Relawan Pemadam Kebakaran ini kita dari masyarakat desa sunggumanai sangat merasa bersyukur karena kita mempunyai pengetahuan baru nak mengenai masalah kebakran yang pernah terjadi di desa kami. Dengan adanya tim Balakar ini pula kita diberikan pemahaman oleh para anggotanya dan memberikan sosialisasi kepada kami masyarakat desa sunggumanai mengenai tata cara penanggulangan kebakaran serta tata cara pencegahannya (Hasil wawancara dengan informan DS pada tanggal 19 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Budaya Inovasi yang berupa menoleransi resiko dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu dengan terbentuknya Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran yang telah dibentuk didesa sunggumanai ini kita mendapatkan pengetahuan baru mengenai tata cara pencegahan kebakaran dan tata cara pencegahan dini melalui sosialisasi yang telah dibawakan oleh kepala seksi pengendalian operasional kebakaran, kepala bidang pencegahan, serta bapak kepala dinas ikut serta dalam memberikan sosialisasi mengenai masalah kebakaran yang tentunya biasa terjadi dilingkungan kita sendiri. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa melibatkan juga para tokoh-tokoh masyarakat desa sunggumanai serta elemen-elemen masyarakat setempat dengan

ikut serta dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) di Kabupaten Gowa.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan SB dari dinas pemadam kebakaran terkait dengan menoleransi konflik mengatakan bahwa:

“Ya saya rasa untuk konflik kepada masyarakat walaupun kita sendiri tau bahwa dalam setiap kelompok masyarakat itu terkadang juga ada get-get ya dimasyarakat tetapi itu merupakan tugas pemerintah desa bagaimana bisa menghindari konflik ini kepada masyarakat yaitu merangkul seluruh masyarakat dan mengikut sertakan dari kelompok masyarakat yang ada dibawah contohnya itu pada setiap desa terbagi dari beberapa dusun jadi setiap dusun itu akan berharap ada perwakilan dari setiap dusun, kemudian disetiap dusun itu ada RW, RT jadi yang akan kita rekrut ini sudah tidak terjadi masalah diskomunikasi atau kesenjangan sosial itu kita memberikan informasih kepada pemerintah desa agar supaya dimasing-masing kelompok masyarakat ini ada perwakilan untuk menjadi tim Balakar itu bisa mengurangi kesenjangan sosial itu sendiri yang ada dimasyarakat. Jadi mengenai ketersediaan alat-alat yang ada dikantor kami saya rasa perlu ada penambahan karena melihat kondisi Kabupaten Gowa baik dari perspektif wilayah maupun penduduk, masih terbilang sangat sulit untuk mencapai standar pelayanan minimum hal ini disebabkan karena rasio jumlah pemadam kebakaran dan jumlah penduduk yang harus dilindungi masih terpaut jauh dari SPM kami. Jumlah armada pemadam kebakaran kami saat ini hanya sebanyak 4 unit dengan jumlah penduduk 750.000 jiwa demikian pula dengan jarak tempuh yang masuk dalam area terlindungi masih sangat sempit karena saat ini dinas kami hanya mempunyai 1 pos sedangkan luas wilayah yang harus dilindungi seluas 1883,33 km jadi inilah yang menjadi permasalahan kami karenanya memiliki satu posko saja sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Gowa sangat banyak (Hasil wawancara dengan informan SB pada tanggal 08 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa menoleransi konflik yang terjalin dalam Program Desa Siaga Bencana Kebakaran yaitu dinas pemadam kebakaran menjalin kerja sama dengan pemerintah desa sunggumanai

membentuk tim Balakar sehingga dengan terbentuknya program ini tingkat musibah kebakaran bisa menurun karena masyarakat sudah memahami bagaimana cara musibah tersebut. Hal ini senada dengan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari Pemerintah Desa Sunggumanai yang mengatakan bahwa:

“Untuk masalah konflik yang ada didesa kami mengenai Program D’Sibali ini terkait masalah peralatan alat-alat pemadam kebakaran itu masih terbelang masih minim dikarenakan kami di desa mempunyai banyak program yang kami mau prioritaskan terlebih dahulu sehingga kita belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melakukan kegiatan-kegiatan suapaya penanganan kebakaran dan kami mohon doa dukungannya agar desa sunggumanai ini bisa melaksanakan atau mengadakan peralatan seperti halnya motor mini damkar dan beberapa peralatan-peralatan lainnya yang bisa menunjang dalam penanganan eee bahaya kebakaran di desa sunggumanai ini. Semoga program-program yang ada didesa kami sudah kelar jadi kami sudah bisa menyediakan alat tersebut sehingga ketika terjadi musih khususnya kebakaran baik itu tim Balakar maupun masyarakat setempat dapat mengambil aalat-alat tersebut yang sudah kami sediakan di kantor desa (Hasil wawancara dengan informan AR pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa budaya inovasi berupa menoleransi konflik dalam program desa siaga kebakaran lingkungan yaitu masih minimnya penyediaan alat-alat kebakaran yang disediakan oleh pemerintah desa dikarenakan ada program yang lebih diprioritaskan didesa sehingga ketika program didesa ini selesai maka pemerintah desa akan memfasilitasi tim balakar ini dengan menyediakan ala-alat pemadam kebakaran contohnya motor mini pemadam kebakaran dan alat pemadam lainnya.

“Dengan dibentuknya Program D’Sibali ini kami dari anggota Balakar mengharapkan kepada pemerintah desa sunggumanai agar dapat menambah penyediaan alat-alat pemadam kebakaran seperti halnya tabung-tabung kecil itu sehingga ketika terjadi musibah kebakaran kita tidak pusing lagi karena selama ini kita terkendala di bagian alat tersebut dan biasanya juga kita memakai alat-alat ataupun perabotan rumah tangga seperti kain basah, ember, timbah dan selan warga yang kita pakai (Hasil wawancara dengan informan BU pada tanggal 27 Maret 2019) ”

Hasil wawancara lainnya dengan masyarakat informan DK yang mengatakan bahwa:

“Hambatannya itu nak kurangnya alat pemadam kebakaran jadi tim balakar ini sangat susah kasian kalau mauki napadamkan api karna kurangnya alat pemadam kebakaran yang mereka gunakan yang setidaknya itu harus disediakan di desa karena ini program di bentuk didesa jadi saya harap bapak kepala desa harus memfasilitasi pengadaan alat tersebut sehingga ketika terjadi kebakaran tim balakar ini tidak kebingungan lagi nak untuk mengatasi kebakaran tersebut (Hasil wawancara dengan informan Dk pada tanggal 19 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa budaya inovasi berupa menoleransi konflik dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu minimnya ketersediaan alat-alat pemadam kebakaran sehingga menyulitkan para petugas dari Damkar maupun Tim balakar yang dibentuk di desa untuk dapat menjangkau terjadinya musibah kebakaran yang ada dikabupaten gowa.

### 3. Sumber Daya Inovasi

Indikator sumber daya inovasi dalam teori Robbins & Coulter adalah pelatihan-pelatihan dan keamanan kerja. Inovasi program desa siaga kebakaran lingkungan dilakukan dengan melihat pelatihan-pelatihan yang berperan dalam program ini selain itu untuk mengetahui seperti apa pemberian keamanan kerja yang dibentuk dalam program ini.

Table 5 : Deskripsi sumber daya inovasi berdasarkan pelatihan-pelatihan dan memberikan keamanan kerja dalam Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan di Kabupaten Gowa.

INFORMAN	PELATIHAN-PELATIHAN	MEMBERIKAN KEAMANAN KERJA
Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Gowa	Melakukan pelatihan mengenai cara-cara penanggulangan dini terhadap musibah kebakaran ataupun musibah alam lainnya.	Diberikan tunjangan asuransi berupa BPJS ketenagakerjaan.
Pemerintah Desa Sunggumanai Kab. Gowa	Pelatihan-pelatihan dari dinas pemadam kebakaran mengenai tata cara pemadaman api.	Tidak adanya tunjangan kerja
Barisan Relawan Pemadam Kebakaran	Pelatihan-pelatihan yang berupa pencegahan kebakaran, pemadaman, penyelamatan korban dan pemberdayaan masyarakat.	Tidak adanya tunjangan kerja
Masyarakat	Diberikan pemahaman mengenai penanggulangan dini terhadap bencana kebakaran umumnya.	Tidak adanya tunjangan kerja

Sumber : Hasil reduksi data 2019

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa sumber daya inovasi yang berupa pelatihan-pelatihan dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan dilihat dari hasil wawancara dibawah ini.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan MS dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan pelatihan-pelatihan mengatakan bahwa:

“Jadi setelah terbentuk D’Sibali yang di rekrut oleh desa itu sendiri kami mengundang seluruh anggota dari pada D’Sibali ini untuk datang ke kantor kami pertama kami memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar terkait tugas pokok dan fungsi SKPD kami secara umum dan secara khusus kami akan memberikan pengetahuan mengenai D’Sibali ini terkait upaya-upaya preventif atau sebagai langkah awal eee pengendalian kebakaran. Ya kita dari Damkar memberikan pelatihan-pelatihan kepada tim Balakar mengenai tata cara pencegahan kebakaran, pemadaman, penyelamatan korban kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat ini semua yang biasa kita sosialisasikan ketika kita turun kemasyarakat dan para anggota relawan kebakaran ini (Hasil wawancara dengan informan MS pada tanggal 17 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu melakukan pelatihan mengenai car-cara penanggulangan dini terhadap musibah kebakaran maupun musibah alam lainnya. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pemerintah Desa Sunggumanai informan AR mengatakan bahwa:

“Saya kira pertama dimana dinas pemadam kebakaran sudah pernah melakukan pelatihan terhadap tim balakar kami di desa sunggumanai walaupun kami sangat ee butuh ada kesinambungan ada keberlanjutan saya kira saran dari Damkar untuk memberikan pembinaan minimal satu kali satu tahun kepada eee desa yang sudah melakukan program desa siaga kebakaran lingkungan atau D’Sibali (Hasil wawancara dengan informan AR pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas menyatakan bahwa pelatihan-pelatihan dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan ini yaitu pelatihan-pelatihan dari Dinas Pemadam Kebakaran mengenai tata cara pemadaman. Hal

tersebut diatas senada dengan apa yang dijelaskan dengan informan RB dari Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran yang mengatakan bahwa:

“...Setelah dibentuknya program ini kami dari anggota Balakar desa sunggumanai merasa bersyukur karena kami mendapatkan pengetahuan baru mengenai masalah kebakaran dan kita pula diberikan pemahaman mengenai tata cara pencegahan, pemadaman, penyelamatan korban dan pemberdayaan masyarakat ini semua merupakan pelatihan yang diberikan dari Damkar kepada kami sehingga kita pula harus menerapkannya kepada lingkungan masyarakat (Hasil wawancara dengan informan RB pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui bahwa tim Balakar desa sunggumanai diberikan pelatihan-pelatihan mengenai tata cara pencegahan kebakaran kepada masyarakat.

Hasil wawancara lainnya dengan informan IS dari masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Ya dengan adanya Program ini saya mendapatkan ilmu baru dari Damkar dan Balakar karna dengan mengadakan sosialisasi masalah kebakaran kita mampu mengetahui bagaimana cara ketika terjadi kebakaran yang ada dilingkungan kita, sehingga kami masyarakat desa sunggumanai sudah mengetahui tata cara penanggulangan dini terhadap bencana kebakaran yang sewaktu-waktu akan terjadi dilingkungan kita (Hasil wawancara dengan informan IS pada tanggal 19 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya inovasi yang berupa pelatihan-pelatihan dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan dari dinas pemadam kebakaran kabupaten gowa dan para tim anggota relawan pemadam kebakaraan desa sunggumanai saling

berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatiha-pelatihan kepada warga masyarakat desa sunggumanai agar masyarakat tersebut mengetahui tata cara penanggulangan kebakaran secara dini.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan MS dari dinas pemadam kebakaran terkait dengan memberikan keamanan kerja mengatakan bahwa:

“Kalau masalah tunjangan keamanan kerja itu kitamendapatkan asuransi seperti halnya BPJS kietenaga kerjaan inilah yang kita dapatkan dari kantor Damkar sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang tak di inginkan maka tunjangan inilah yang dapat kami gunakan.(Hasil wawancara dengan informan MS pada tanggal 17 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa memberikan keamanan kerja dalam program D’Sibali ini yaitu dinas pemadam kebakaran mendapatkan tunjangan keamanan kerja dari kantor Damkar itu sendiri. Namun hal diatas tidak senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan AR dari pemerintah desa sunggumanai yang mengatakan bahwa:

“Saya kira desa kami belum ee sampai kesana karena kami ada beberapa keterbatasan baik itu berupa dana dan ada juga hal yang lebih kita prioritaskan di desa sunggumanai ini. Jadi kami pemerintah desa belum merealisasikan yang namanya tunjangan keamanan kerja terhadap para tim balakar kami dan mudah-mudah di tahun yang akan datang kami sudah memberikan tunjangan tersebut kepada para tim relawanan kebakaran ini insya allah kamu akan usahakan dengan beberapa peralatan yang mendukung untuk melakukan mengantisipasi atau mencegah upaya kebakaran di desa sunggumanai ini (Hasil wawancara dengan informan AR pada tanggal 27 Maret 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya inovasi yang berupa memberikan keamanan kerja dalam D'Sibali ini yaitu pemerintah desa belum merealisasikan tunjangan keamanan kepada para anggota barisan relawan pemadam kebakaran desa sunggumanai dikarenakan ada hal yang lebih di utamakan untuk diselesaikan di desa.

“Saya rasa belum ada tunjangan keselamatan yang di berikan oleh bapak kepala desa sunggumanai kepada kami tim balakar sehingga kami menginginkan bapak kepala desa mampu memberikan asuransi kepada kami ketika terjadi musibah yang seakian-akan akan kami hadapi di lingkungan masyarakat ketika kami memberikan bantuan keselamatan korban yang terkena musibah kebakaran (Hasil wawancara dengan informan BU pada tanggal 27 Maret 2019)”

Hasil wawancara lainnya dengan masyarakat informan DK yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada tunjangan keamanan kerja yang kita dapatkan dari pemerintah desa sehingga kami berharap semoga tunjangan keamanan ini segera direalisasikan dananya dengan menggunakan danadesa yang tiap tahunnya keluar di desa (Hasil wawancara dengan informan DK pada tanggal 19 Mei 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya inovasi dalam program D'Sibali ini hanya dari kantor Damkarlah yang hanya mendapatkan tunjangan keamanan kerjaberupa BPJS ketenaga kerjaan yang diberikan oleh bapak bupati gowa dan baik anggota Balakar dan masyarakat desa sunggumanai belum mendapatkan tunjangan keamanan kerja dari pemerinta desa sunggumanai itu sendiri. Insyallah tahun depan akan segera dilaksanakan sehingga kata-kata kekhawatiran yang ada dihati

para anggota balakar maupun masyarakat yang saling bekerja sama membantu korban yang terkena musibah kebakaran.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penelitian ini melihat bagaimana inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan di Kabupaten Gowa model Inovasi yang digunakan sebagai berikut:

##### 1. Struktur Inovasi

Struktur inovasi dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan terdiri atas tiga sub indikator yaitu : SDM, komunikasi dan organisasi. SDM dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya saja perlu ada penambahan fasilitas alat pemadam kebakaran sehingga nantinya dapat memudahkan tim Balakar dalam memadamkan api yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian komunikasi dalam program ini harus saling terjaling antara Kantor Disdamkar dan Kantor Desa Sunggumanai agar dapat meminimalisir tingkat musibah terjadinya kebakaran. Organisasi dalam program ini yang dibentuk oleh kepala desa sunggumanai sendiri yang diberi nama Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) yang mampu memberikan penanganan dini jika terjadi musibah kebakaran sebelum Disdamkar tiba kelokasi terjadinya kebakaran.

## 2. Budaya Inovasi

Budaya inovasi dalam Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan yaitu terdiri atas dua sub indikator yaitu : menoleransi resiko dan menoleransi konflik. Menoleransi resiko dalam program ini yaitu di melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan mengenai pencegahan bahaya kebakaran, penyelamatan korban kebakaran dan pemberdayaan masyarakat. Adapun menoleransi konflik yang harus diminimalisir di dimasyarakat dikarenakan kurangnya komunikasi dan minimnya ketersediaan alat-alat pemadam kebakaran sehingga inilah yang sering dapat memicu terjadinya konflik.

## 3. Sumber Daya Inovasi

Sumber daya inovasi disini terdiri atas dua sub indikator yaitu : pelatihan-pelatihan dan memberikan keamanan kerja. Dimana masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini karena mendapatkan pengetahuan baru mengenai cara mengantisipasi terjadinya musibah kebakaran. Dalam program ini tim balakar belum mendapatkan tunjangan keselamatan dari desa hanya Disdamkar yang mendapatkan tunjangan keamanan kerja berupa BPJS ketenagakerjaan dari pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan di Kabupaten Gowa, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Diharapkan bagi Pemerintah Desa Sunggumanai Kecamatan Patallasang Kabupaten Gowa agar kiranya menyediakan atau memfasilitasi perlengkapan alat-alat pemadam kebakaran yang masih minim di desa sehingga ketika terjadi musibah kebakaran para tim balakar tidak selulitan lagi dalam menjalankan tugasnya dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat untuk memadamkan api yang ketika sewaktu-waktu akan terjadi dilingkungan masyarakat sendiri.
2. Perlu adanya penambahan penyediaan pos pelayanan atau pengaduan yang harus tersedia satu unit mobil kebakaran yang harus di sediakan disetiap kecamatan sehingga dapat meminimalisir tingkat terjadinya musibah kebakaran yang ada disetiap desa dan kelurahan. Karena mampu kita ketahui bahwa wilayah kabupaten gowa ini sangat luas sehingga disdamkar tidak mampu mencakup seluruh wilayah tersebut hanya wilayah yang termasuk WMK saja.
3. Perlunya ada penambahan unit mobil pemadam kebakaran yang harus disiapkan di disdamkar.
4. Perlunya ada pelatihan-pelatihan satu kali dalam tiga bulan agar masyarakat yang ikut dalam sosialisasi tersebut tidak lupa dengan arahan yang pernah diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Fauzi. Skripsi Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar tahun 2016.
- Angraeny. 2013. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 1 Nomor 1.
- Anoim <http://inovasi.lan.go.id/index.php?post/read&id=679> di akses pada tanggal 10 agustus 2018. Pukul 10:09 wita.
- Anoim. 2018. *Inovasi Program Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi Hapus Rapor Merah*. (Online) <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/18657>. Di akses pada tanggal 10 agustus 2018. Pukul 10:26 wita.
- Arikunto, Suharsimi Dkk. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aripunto dan Jabar, 2009. *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoretis dan Praktis Bagi mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ashiong P. Munthe, 2015. *Pentingnya Evaluasi Program di Institut Pendidikan*. Tangerang: Universitas Pelita Harapan Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Deddy Mulyadi, dkk. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Defny Holidin, dkk. 2017. *Reformasi Birokrasi Dalam Transisi*. Jakarta: Kencana.
- Dhewanto Wawan, dkk. 2014. *Manajemen Inovasi*. Yogyakarta. Penerbit: Andi Offset.
- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XII Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun. 2017. Gowa: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.
- Donald B, Yarbrough. et. al. 2010. *Joint Committee on Standards for Educational Evaluation: The Program Standards: A Guide for Evaluators and Evaluation Users*. California: Sage Publication.
- Dwiyanto, Agus. 2004. *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik. Government ke Governance: Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM*.

- Halvorsen, Thomas, et al. 2015. On the Differences between Public and Private Sector Innovations. Publin Report. Oslo.
- HetifaSj, Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Konsep Desa Siaga. (Online) <http://dinkes.lumajangkab.go.id>. Akses Pada Tanggal 12 Maret 2018. Pukul 16:32 Wita.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*, Kota Gorontalo: Ung Press.
- Lewis, Carol W. and Stuart C Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, San Fransisco: Jossey Bass.
- Makmur, & Thahir, Rohana. 2012. *Inovasi & Kreativitas Manusia dalam Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Muchlas M. Tahir. 2015. *Inovasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Muhaimin, dkk. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Nasrulhaq, dkk. 2017. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Masyarakat Pengguna *Bus Rapid Transit (BRT)* Maminasata. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol, 3.No, 2.
- Natalisa, Diah. 2018. *Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik (One Agency One Innovation)*. (Online) [http://inovasi.lan.go.id/uploads/download/1518067024\\_KemenPANRB\\_SLIDE-KOLABORASI-INOVASI-KEMPAN-DAGRI-DAN\\_LAN\\_Deputi-Yanlik.pdf](http://inovasi.lan.go.id/uploads/download/1518067024_KemenPANRB_SLIDE-KOLABORASI-INOVASI-KEMPAN-DAGRI-DAN_LAN_Deputi-Yanlik.pdf). Diakses pada tanggal 9 Mei 2018, pukul 22:45 WITA.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurmandi, Priyono Umar. 2006. *Implementasi Knowledge Management Pada Organisasi Publik*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Nurdin G., Zulfa. 2016. *Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Skripsi Pada Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta:PTGramedia.
- Owen, John M. 2006. *Program Evaluation: Forms and Approaches*. CrowsNest: Allen & Unwin.
- Putera Prakoso, dkk. 2014. *Kebijakan Inovasi di Daerah*. Jakarta. Penerbit: LIPI Press.
- Rahayu, Ami. 2015. *Manajemen perubahan dan Inovasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pers).
- Ramandita, Shalfiah. 2013. *Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang*.E-Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 1 Nomor 3 ISSN 2338-3615.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Robbins, Sthepen P, Mary Coulter. 2010. *Pengertian Inovasi*. [www.Pelajaran.co.id/2018/05/Pengertian-Inovasi-Ciri-Indikator-Sifat-Dan-Jenis-Inovasi-Menurut-Para-Ahli.html](http://www.Pelajaran.co.id/2018/05/Pengertian-Inovasi-Ciri-Indikator-Sifat-Dan-Jenis-Inovasi-Menurut-Para-Ahli.html) Diakses pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 20:16 Wita.
- Sangkala. 2013. *Innovative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Siti Erna LatifiSuryana. 2009. *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Subarsono. 2006. *Pelayanan Publik yang Efisien, Responsitif, dan non partisan*, Yogyakarta: Gadjamada University Perss.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press.

Syukri, Muh. 2017. *Desa Sunggumanai Pelopori D'SIBALI, Desa Siaga Kebakaran Lingkungan*. (Online) <http://lintasterkini.com>. Akses pada tanggal 24 februari 2018.

Tribun Jabar.id. .2019.bencana alam Sulawesi selatan: sudah 68 orang dinyatakan meninggal. (online) <http://jabar.tribunnews.com>. Akses Senin 28 januari 2019 pukul 14:02 Wita.

**Sumber Lain:**

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 pasal 7 ayat (4) huruf c, tentang pelayanan publik.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Surat Keputusan Desa Sunggumanai No. 15/SK/DSM/VII/2017 Tentang Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Wawancara dengan informan Tokoh Masyarakat Desa Sunggumanai Kecamatan Patallassang Kab. Gowa



Wawancara dengan informan Tokoh Agama Desa Sunggumanai Kecamatan Patallassang Kab. Gowa



Wawancara dengan Ketua Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Sunggumanai Kecamatan Patallassang Kab. Gowa



Wawancara dengan Anggota Tim Barisan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Sunggumanai Kecamatan Patallassang Kab. Gowa



Wawancara dengan informan Anggota Balakar Desa Sunggumanai Kecamatan Patallassang Kab. Gowa



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sunggumanai Kecamatan Patallassang Kab. Gowa



Wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Kab. Gowa



Wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran



Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Gowa



Wawancara dengan informan Bendahara Penerima Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Gowa



Wawancara dengan informan Anggota Penyelamat Resque Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Gowa



Wawancara dengan informan dibidang Provos Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Gowa



Foto penandatanganan kerjasama antara kantor Dinas Pemadam Kebakaran dengan Bapak Kepala Desa Sunggumanai Kecamatan Patallasang Kab. Gowa



Foto bersama setelah diadakannya sosialisasi dan pelantikan anggota Balakar Desa Sunggumanai Kecamatan Patallasang Kab. Gowa



Pemberian arahan kepada para anggota Balakar di kantor dinas pemadam kebakaran Kab. Gowa



Bentuk- bentuk pelatihan yang dilakukan oleh anggota Balakar Kab. Gowa





Pedoman Wawancara

Lokasi : Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dan Kantor Desa  
Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa

Fokus	Indikator	Pertanyaan
Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali)	1.Struktur Inovasi	1. Bagaimana struktur inovasi dalam ketersediaan sumber daya di desa siaga kebakaran lingkungan (D'Sibali) kabupaten gowa?
		2. Bagaimanakah struktur inovasi dalam sistem komunikasi antara dinas pemadam kebakaran dengan masyarakat di desa sunggumanai mengenai program desa siaga kebakaran lingkungan ini?
		3. Bagaimana struktur inovasi mengenai organisasi apa saja yang telah dibuat oleh dinas pemadam kebakaran terhadap program (D'Sibali) ini?
		4. Bagaimana struktur inovasi mengenai kinerja kreatif dinas pemadam kebakaran beserta para relawan yang ditetapkan di setiap desa atau kelurahan dalam memberikan pertolongan langsung kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah di kabupaten gowa?

	2. Budaya Inovasi	<p>1. Bagaimanakah budaya inovasi dalam menerima ambiguitas di desa siaga kebakaran lingkungan (D'Sibali) kabupaten gowa?</p> <p>2. Bagaimana budaya inovasi dalam hal menoleransi resiko mengenai proram desa siaga kebakaran lingkungan di kabupaten gowa?</p> <p>3. Bagaimana budaya inovasi dalam hal menoleransi konflik mengenai program desa siaga kebakaran lingkungan ini?</p> <p>4. Bagaimanakah budaya inovasi program (D'Sibali) ini dalam hal berfokus pada hasil bukan cara?</p> <p>5. Bagaimana budaya inovasi dalam hal berfokus pada sistem terbuka mengenai program (D'Sibali) di kabupaten gowa?</p>
	3. Sumber Daya Inovasi	<p>1. Bagaimana sumber daya inovasi dalam hal organisasi mengenai program (D'Sibali) ini?</p> <p>2. Bagaimana sumber daya inovasi dalam hal pemberian keamanan kerja terhadap petugas yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang menghadapi musibah?</p>

## RIWAYAT HIDUP



Nur ayyung atau yang lebih dikenal dengan sebutan ayyung lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 27 Mei 1996. Anak ketiga dari dua bersaudara lahir dari pasangan suami istri Muh.Yahya dan St.Aisyah memiliki dua kakak laki-laki yang bernama Muh.Yusram dan Zulkifli S.pd Bertempat tinggal di Gowa Jalan Pelita Tamala'lang Desa Tamannyeleng. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Taeng Kabupaten Gowa dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Barombong Kabupaten Gowa lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya di SMA Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan ketekunan hingga motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D’Sibali) di Kabupaten Gowa”